

**PENGARUH RENCANA ANGGARAN TERHADAP REALISASI ANGGARAN
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2019-2024**

(Tesis)

Oleh
RINATA SEPTIANI PUTRI
NPM 2426061003



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**PENGARUH RENCANA ANGGARAN TERHADAP REALISASI ANGGARAN
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2019-2024**

Oleh

RINATA SEPTIANI PUTRI

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar MAGISTER
ADMINISTRASI**

Pada

**Jurusan Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PENGARUH RENCANA ANGGARAN TERHADAP REALISASI ANGGARAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2019-2024

Oleh

RINATA SEPTIANI PUTRI

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas tata kelola keuangan pemerintah daerah, khususnya terkait kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi belanja. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah terhadap realisasi anggaran pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung periode 2019-2024, dengan jumlah penduduk digunakan sebagai variabel kontrol. Kajian teoritis penelitian ini berlandaskan pada Teori Keuangan Publik Musgrave, Fiscal Federalism, Akuntabilitas Publik, serta Teori Demografi Fiskal yang menjelaskan hubungan antara kapasitas fiskal, kebutuhan pelayanan publik, dan pencapaian realisasi anggaran. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel melalui model Fixed Effect. Data yang digunakan merupakan data sekunder resmi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta laporan realisasi APBD pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah belum berpengaruh signifikan terhadap realisasi anggaran, sedangkan jumlah penduduk sebagai variabel kontrol berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kebutuhan fiskal dan tingkat serapan anggaran. Secara simultan, seluruh variabel dalam model penelitian berpengaruh signifikan terhadap realisasi anggaran kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Kata Kunci: Realisasi Anggaran, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah dan Jumlah Penduduk

ABSTRACT

THE EFFECT OF BUDGET PLANNING ON BUDGET REALIZATION IN REGENCIES/CITIES OF LAMPUNG PROVINCE FOR THE PERIOD 2019-2024

By

RINATA SEPTIANI PUTRI

The management of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) is a crucial indicator in assessing the effectiveness of local government and financial governance. particularly regarding the alignment between budget plans and expenditure realization. This study aims to analyze the influence of regional revenue, regional expenditure, and regional financing on budget realization in districts either cities in Lampung Province during the period 2019-2024, with population size used as a control variable. The theoretical framework of this research are based on Musgrave's Public Finance Theory, Fiscal Federalism, Public Accountability, and Fiscal Demographic Theory, which explain the relationship between fiscal capacity, public service needs and the budget of realization achievement. The research method employs a quantitative approach with panel data regression analysis using the fixed effect model. The data used are official secondary data sourced from the central Bureau of Statistics, the ministry of finance of the Republic of Indonesia, and local government (APBD) realization reports. The results shows that partially, regional revenue, regional expenditure, and regional financing have no significant effect on budget realization while population size as a control variable has a significant effect in increasing fiscal needs and budget absorption rates. Simultaneously, all variables in the research model have a significant effect on the budget realization of districts either cities in Lampung Province.

Keywords: Budget Realization, Regional Revenue, Regional Expenditure, Regional Financing and Population Size

Judul Tesis : PENGARUH RENCANA ANGGARAN
TERHADAP REALISASI
ANGGARAN KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2019-2024

Nama Mahasiswa : Rinata Septiani Putri

Nomor Pokok Mahasiswa : 2426061003

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



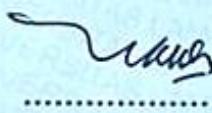
MENGETAHUI
Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi

Dr. Dra. Dian Kagungan, M.H.
NIP. 196908151997032001

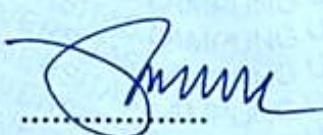
MENGESAHKAN

1. Tim Pengaji

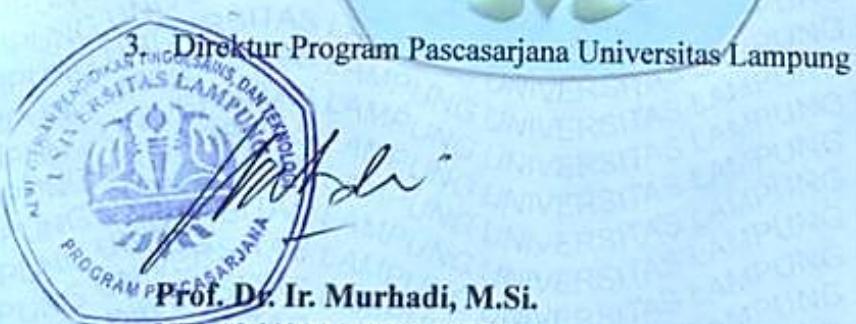
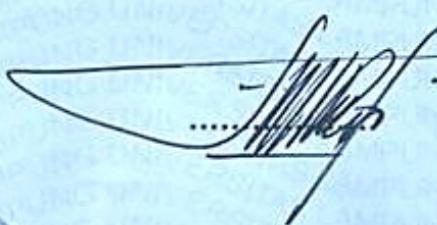
Ketua : Prof. Dr. Bambang Utoyo S, M.Si.



Pengaji Utama : Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.



Sekretaris : Dr. Suripto, S. Sos.,M.AB



Tanggal Lulus Ujian Tesis : 28 Januari 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul "**PENGARUH RENCANA ANGGARAN TERHADAP REALISASI ANGGARAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2019-2024**" adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dari karya pihak lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku di lingkungan akademik, atau yang disebut dengan plagiarisme.
2. Hak atas kekayaan intelektual dari karya ilmiah ini saya serahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala konsekuensi dan sanksi yang berlaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 28 Januari 2026

Pembuat Pernyataan



RINATA SEPTIANI PUTRI

NPM 2426061003

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada 28 September 1995. Penulis merupakan anak kedua dari lima bersaudara, putri dari Bapak Rizal Musa dan Ibu Nana Marlina.

Pendidikan penulis dimulai dari tahun 2000-2001 di TK Arusdah Bandar Lampung, dilanjutkan di SD Negeri 1 Tanjung Agung Bandar Lampung tahun 2001-2007. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 12 Bandar Lampung tahun 2007-2010 dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Ke di SMA Negeri 3 Bandar Lampung tahun 2010-2013.

Penulis Menempuh Pendidikan Sarjana Jurusan Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung lulus tahun 2019. Tahun 2024 penulis melanjutkan pendidikan Magister pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Ketertarikan penulis terhadap kajian administrasi publik, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan daerah dan kinerja pemerintahan, didorong oleh pengalaman profesional penulis di bidang yang berkaitan dengan proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran sektor publik. Keterkaitan antara pengalaman tersebut dengan topik penelitian ini menjadi dasar dalam penyusunan tesis.

PERSEMPAHAN

Untuk diriku yang belajar bertahan, bertumbuh, dan menyelesaikan proses dengan penuh kesadaran.

Untuk keluarga serta orang-orang terdekat yang aku miliki saat ini, yang mendukung tanpa syarat di setiap langkah serta keputusan apapun yang aku ambil.

Dan untuk keluarga yang kelak akan aku bangun, semoga setiap langkah hari ini menjadi pondasi yang baik untuk masa depan yang penuh makna.

MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.”
(HR. Ahmad)

“Berbuat baiklah kepada setiap orang, karena kita tidak pernah tahu dari mana pertolongan akan datang.” (Oki Rengga)

“Proses yang dijalani dengan sungguh-sungguh akan menemukan jalannya sendiri, Karna Allah tidak pernah salah menempatkan hamba-Nya dalam sebuah proses.” (Rinata Septiani Putri)

SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penyusunan tesis yang berjudul “Pengaruh Rencana Anggaran Terhadap Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2019-2024” merupakan proses akademik yang penuh pembelajaran, ketekunan, dan tanggung jawab penulis untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Admiistrasi di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Terutama dan teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Ayah dan Ibu, yang tak pernah lelah memberikan cinta, perhatian, dan pengorbanan tanpa batas. Terima kasih atas setiap perjuangan, kesabaran, dan kasih sayang yang selalu mengiringi langkah penulis hingga sampai di titik ini.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung, yang menjadi kunci dalam keberhasilan suatu perguruan tinggi.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. Direktur Program Pascasarjana, sebagai penjaminan mutu perguruan tinggi yang memperkuat daya saing regional dan internasional.
4. Bapak Prof. Sunyono, M.Si., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Lampung yang telah memberikan dukungan dan perhatian dalam pengembangan kegiatan akademik serta kemahasiswaan.
5. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, yang telah mendukung dan memfasilitasi kebutuhan akademik dalam pelaksanaan studi dan penelitian ini.
6. Ibu Dr. Dra. Dian Kagungan, M.H., selaku Ketua Jurusan Magister Ilmu Administrasi telah membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan tesis ini.
7. Prof. Dr. Bambang Utomo S, M.Si. selaku pembimbing pertama. Terimakasih atas ilmu dan kesabarannya dalam membimbing Penulis. Terimakasih telah banyak membantu dan bersedia membimbing.

8. Dr. Suripto, S. Sos.,M.AB. selaku pembimbing kedua. Terimakasih atas kesabaran untuk meluangkan waktu dalam menghadapi Penulis, atas segala bimbingan ilmu, saran yang sangat bermanfaat serta mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembahas dan penguji yang telah memberikan kritik, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
10. Seluruh Dosen dan Staff Magister Ilmu Admistrasi FISIP Unila, terima kasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada penulis selama di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
11. Kakak-kakakku dan adik-adikku, Veriza Nanda, Riananda Adelina Yunia Rahmawati, Ilham Pratama, Salma izzi Maula dan Ahmad Syauqi Mubaroq. Terimakasih untuk segala doa, dukungan, cinta dan kasih sayang serta canda tawa yang diberikan.
12. Teruntuk diriku sendiri, aku bangga atas setiap langkah kecil yang telah ditempuh, setiap usaha yang tidak terlihat, serta setiap air mata dan doa yang mengiringi perjalanan ini. Semua itu menjadi bukti bahwa aku mampu bertahan, berjuang, dan pantas menikmati kebahagiaan atas proses yang telah dilalui.

Bandar Lampung, 28 Januari 2026
Penulis,

Rinata Septiani Putri

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABLE	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoretis.....	6
1.4.2 Manfaat Praktis	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Teori Keuangan Publik	8
2.2 Teori Keuangan Publik Musgrave	14
2.2.1 Hubungan Teori Musgrave dengan Variabel Penelitian	17
2.3 Teori Fiscal Federalism	19
2.3 Teori New Public Management	23
2.4 Teori Akuntabilitas Publik	26
2.6 Teori Zero-Based Budgeting	29
2.7 Teori Demografi Fiskal.....	32
2.8 Penelitian Terdahulu yang Relevan	35
2.9 Kerangka Berfikir	39
2.9.1 Pendapatan Daerah (X_1)	40
2.9.2 Belanja Daerah (X_2)	41
2.9.3 Pembiayaan Daerah (X_3)	42
2.9.4 Jumlah Penduduk (X_4).....	43
2.9.5 Realisasi Anggaran (Y)	44

2.10 Hipotesis Penelitian.....	44
III. METODE PENELITIAN	46
3.1 Desain Penelitian	46
3.2 Populasi dan Teknik Sampling	46
3.3 Variabel Penelitian	48
3.4 Definisi Operasional Variabel.....	48
3.5 Teknik Pengumpulan Sumber Data	49
3.6 Uji Validitas Data.....	49
3.7 Analisis Deskriptif dan Inferensial	50
3.7.1 Analisis Deskriptif.....	50
3.7.2 Analisis Inferensial.....	50
3.7.3 Uji Asumsi Klasik	51
3.7.4 Uji Hipotesis.....	51
3.8 Tingkat Signifikansi Penelitian.....	51
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Gambaran Umum Penelitian.....	53
4.1.1 Deskripsi Data Penelitian.....	53
4.1.2 Gambaran Umum APBD kabupaten/kota di Provinsi Lampung	63
4.1.3 Program dan Kinerja Keuangan Daerah.....	65
4.1.4 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung.....	69
4.1.5 Mekanisme Penyusunan dan Pelaksanaan APBD kabupaten/kota di Provinsi Lampung	72
4.2 Hasil Penenlitian.....	78
4.2.1 Analisis Deskriptif Data	78
4.2.2 Uji Pemilihan Model Regresi Panel	81
4.2.3 Hasil Estimasi Model Regresi Panel	85
4.2.4 Uji Asumsi Klasik Model Regresi.....	90
4.2.5 Hasil Pengujian Hipotesis	98
4.3 Pembahasan	106
4.3.1 Analisis Kecocokan Model (R-Square dan Uji Asumsi Klasik)	106
4.3.2 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian Berdasarkan Grafik.....	108

4.3.2 Analisis Perbandingan Fiskal Antar Kabupaten/Kota	185
4.3.3 Pembahasan Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	192
4.3.4 Pembahasan Pengaruh Pendapatan Daerah (X_1) terhadap Realisasi Anggaran (Y).....	198
4.3.5 Pembahasan Pengaruh Belanja Daerah (X_2) terhadap Realisasi Anggaran (Y).....	201
4.3.6 Pembahasan Pengaruh Pembiayaan Daerah (X_3) terhadap Realisasi Anggaran (Y).....	203
4.3.7 Pembahasan Pengaruh Jumlah Penduduk (X_4) terhadap Realisasi Anggaran (Y).....	208
4.3.8 Pembahasan Pengaruh Simultan Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, dan Penduduk terhadap Realisasi Anggaran (Uji F)	212
4.3.9 Keterkaitan Temuan dengan Teori.....	216
4.3.10 Keterkaitan Temuan dengan Penelitian Terdahulu.....	219
4.3.11 Implikasi Kebijakan	221
V. SIMPULAN DAN SARAN.....	225
5.1 Simpulan	225
5.2 Saran.....	226
DAFTAR PUSTAKA.....	228

DAFTAR TABLE

	Halaman
Tabel 4. 1 Aanalisis Deskriptif	78
Tabel 4. 2 Uji Chow.....	81
Tabel 4. 3 Uji Hausman	83
Tabel 4. 4 Hasil Fixed Effect Model.....	85
Tabel 4. 5 Uji Autokolerasi.....	96
Tabel 4. 6 Uji Cross-Section Dependence.....	97
Tabel 4. 7 Uji Hipotesis	98

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2. 1 Kerangka Pikiri	40
Gambar 4. 1 Persamaan Regresi Panel.....	88
Gambar 4. 2 Uji Multikolinearitas	90
Gambar 4. 3 Uji Heteroskedastisitas.....	93
Gambar 4. 4 Uji Normalitas Residual.....	94
Gambar 4. 5 Grafik Pendapatan Daerah X₁	109
Gambar 4. 6 Grafik Belanja Daerah X₂.....	116
Gambar 4. 7 Grafik Pembiayaan Daerah X₃.....	126
Gambar 4. 8 Grafik Jumlah Penduduk X₄.....	133
Gambar 4. 9 Grafik Realisasi Anggaran Y	136
Gambar 4. 10 Grafik Perkembangan Variabel Penelitian di Kota	140
Gambar 4. 11 Grafik Perkembangan Variabel Penelitian di Kota	143
Gambar 4. 12 Grafik Perkembangan Variabel Penelitian di Kabupaten Way Kanan (2019-2024).....	146
Gambar 4. 13 Grafik Perkembangan Variabel Penelitian di Kabupaten Tulang Bawang Barat (2019-2024).....	149
Gambar 4. 14 Grafik Perkembangan Variabel Penelitian di Kabupaten Tulang Bawang (2019-2024).....	152
Gambar 4. 15 Grafik Perkembangan Variabel Penelitian di Kabupaten Tanggamus (2019-2024).....	155
Gambar 4. 16 Grafik Perkembangan Variabel Penelitian di Kabupaten Pringsewu (2019-2024).....	158
Gambar 4. 17 Grafik Perkembangan Variabel Penelitian di Kabupaten Pesisir Barat (2019-2024).....	161
Gambar 4. 18 Grafik Perkembangan Variabel Penelitian di Kabupaten Pesawaran (2019-2024).....	164
Gambar 4. 19 Grafik Perkembangan Variabel Penelitian di Kabupaten Mesuji (2019- 2024)	167

Gambar 4. 20 Grafik Perkembangan Variabel Penelitian di Kabupaten Lampung Utara (2019-2024).....	170
Gambar 4. 21 Grafik Perkembangan Variabel Penelitian di Kabupaten Lampung Timur (2019-2024).....	173
Gambar 4. 22 Grafik Perkembangan Variabel Penelitian di Kabupaten Lampung Tengah (2019-2024)	176
Gambar 4. 23 Grafik Perkembangan Variabel Penelitian di Kabupaten Lampung Selatan (2019-2024).....	179
Gambar 4. 24 Grafik Perkembangan Variabel Penelitian di Kabupaten Lampung Barat (2019-2024).....	182

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah merupakan aktor penting dalam tata kelola pembangunan nasional. Sejak diberlakukannya otonomi daerah dan penguatan hubungan keuangan pusat dan daerah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengelola sumber daya, termasuk pengelolaan keuangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kewenangan tersebut tidak hanya bermakna administratif, tetapi juga strategis karena menentukan sejauh mana pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan publik, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan APBD menjadi indikator utama keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah.

APBD berfungsi sebagai instrumen utama dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Anggaran ini menggambarkan kapasitas fiskal, prioritas pembangunan, serta komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Halim (2019), efektivitas APBD dapat diukur melalui tingkat kesesuaian antara rencana anggaran dengan realisasi belanja. Semakin kecil deviasi antara keduanya, semakin tinggi tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah daerah. Sebaliknya, deviasi yang besar menandakan adanya masalah dalam perencanaan, implementasi, maupun pengawasan fiskal.

Meskipun kerangka regulasi telah memberikan keleluasaan bagi daerah, efektivitas APBD di banyak wilayah Indonesia masih menghadapi berbagai

kendala. Salah satu persoalan utama adalah deviasi antara rencana dan realisasi anggaran. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (2023), rata-rata serapan APBD nasional pada triwulan ketiga hanya mencapai 58,2 persen dari target minimal di atas 70 persen sebagaimana pedoman monitoring APBD Kementerian Keuangan (2022). Rendahnya tingkat realisasi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan fiskal dan pelaksanaan program.

Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK, 2022) mengidentifikasi berbagai penyebab rendahnya realisasi anggaran, antara lain keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa, rendahnya kapasitas perencanaan di perangkat daerah, serta lemahnya mekanisme pengawasan anggaran. Fenomena ini menegaskan adanya kesenjangan kebijakan (policy gap) antara rencana anggaran dan realisasi belanja yang berdampak pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Provinsi Lampung, sebagai salah satu daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Sumatera, tidak terlepas dari persoalan tersebut. Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2023) menunjukkan bahwa rata-rata realisasi belanja APBD kabupaten/kota di Lampung pada periode 2019–2022 hanya mencapai 89,7 persen, relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai sekitar 92 persen. Beberapa kabupaten bahkan mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang cukup besar. Kabupaten Mesuji, misalnya, pada tahun 2021 memiliki SiLPA lebih dari Rp200 miliar. Tingginya SiLPA sering diartikan sebagai kegagalan pemerintah daerah dalam mengeksekusi program pembangunan sesuai rencana, sehingga anggaran yang seharusnya mendorong kesejahteraan masyarakat justru menjadi saldo kas yang kurang produktif.

Pendapatan daerah menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kapasitas fiskal. Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi memiliki fleksibilitas lebih besar dalam membiayai program prioritas tanpa harus bergantung penuh pada transfer pusat. Mahmudi (2019) menegaskan bahwa PAD berfungsi sebagai indikator kemandirian fiskal daerah. Namun, sebagian besar kabupaten/kota di Lampung masih menghadapi kendala serius

terkait rendahnya kontribusi PAD. Data Badan Pusat Statistik (2022) menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi PAD hanya berkisar antara 15–20 persen dari total pendapatan daerah. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat menjadikan struktur APBD daerah rentan terhadap keterlambatan pencairan dana maupun perubahan kebijakan fiskal, sehingga berpotensi memperbesar kesenjangan antara rencana dan realisasi anggaran.

Belanja daerah juga berperan penting dalam merealisasikan pembangunan. Idealnya, struktur belanja harus seimbang antara belanja operasional dan belanja modal. Belanja operasional diperlukan untuk menjamin keberlangsungan layanan dasar, sementara belanja modal menjadi motor utama pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun, laporan BPK (2022) menunjukkan bahwa belanja pegawai masih mendominasi struktur APBD kabupaten/kota di Lampung, sedangkan porsi belanja modal relatif kecil. Dominasi belanja rutin ini membatasi daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, serta mengurangi efektivitas realisasi anggaran pembangunan.

Pembiayaan daerah memiliki fungsi penting sebagai instrumen stabilisasi fiskal. Musgrave (1959) dalam teori keuangan publik menegaskan bahwa pembiayaan dapat digunakan untuk menutup defisit maupun mengelola surplus anggaran. Pemanfaatan SiLPA, pinjaman daerah, dan sumber pembiayaan lainnya seharusnya menjadi mekanisme untuk menjaga keberlanjutan fiskal. Santosa (2020) membuktikan bahwa pengelolaan pembiayaan yang baik mampu memperkuat akurasi realisasi APBD. Namun, praktik di Lampung menunjukkan bahwa pembiayaan daerah belum sepenuhnya optimal. Beberapa pemerintah daerah cenderung menumpuk SiLPA daripada memanfaatkannya untuk mendukung program pembangunan produktif, yang mencerminkan kelemahan perencanaan fiskal dan minimnya inovasi pengelolaan pembiayaan.

Selain faktor fiskal, aspek demografi juga memengaruhi realisasi anggaran. Jumlah penduduk merupakan variabel penting dalam analisis fiskal karena berkaitan langsung dengan kebutuhan layanan publik. Rodríguez-Pose dan Ezcurra (2010) menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk menimbulkan

tekanan fiskal akibat meningkatnya permintaan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya. Data BPS (2023) mencatat jumlah penduduk Provinsi Lampung mencapai 9,1 juta jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,15 persen per tahun. Variasi jumlah penduduk antar kabupaten/kota menimbulkan perbedaan kebutuhan belanja publik, kapasitas fiskal, dan kemampuan realisasi anggaran, sehingga menjadikan faktor demografis sebagai variabel determinan dalam kinerja fiskal daerah.

Berbagai penelitian terdahulu menyoroti pengaruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan terhadap kinerja keuangan daerah (Anggraeni & Risnawati, 2024; Sari & Utama, 2021; Santosa, 2020). Namun, sebagian besar penelitian tersebut belum banyak memasukkan faktor demografis, khususnya jumlah penduduk, sebagai variabel kontrol. Padahal, kondisi demografi memiliki implikasi langsung terhadap kebutuhan fiskal dan efektivitas realisasi APBD. Keterbatasan ini menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan teoretis dan realitas empiris pengelolaan APBD di daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertumpu pada integrasi teori keuangan publik, teori fiscal federalism, teori akuntabilitas publik, dan teori demografi fiskal untuk memberikan perspektif komprehensif mengenai pengaruh faktor fiskal dan demografis terhadap realisasi anggaran.

Pemilihan periode penelitian 2019-2024 dilakukan secara strategis karena mencakup dua fase penting, yaitu pelaksanaan dua periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta masa pandemi COVID-19 yang berdampak signifikan terhadap perubahan prioritas dan realokasi belanja daerah. Selain pertimbangan akademik, pemilihan periode dan lokasi penelitian juga didorong oleh kedekatan penulis dengan konteks pembangunan daerah di Provinsi Lampung, sehingga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap dinamika pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaruh pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, serta jumlah penduduk terhadap realisasi anggaran di kabupaten/kota Provinsi Lampung periode 2019-2024. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu administrasi publik serta rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Urgensi penelitian semakin relevan mengingat masih belum optimalnya kualitas realisasi APBD di Provinsi Lampung yang berpotensi menghambat pembangunan daerah, sehingga diperlukan strategi berbasis data empiris agar anggaran benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Realisasi Anggaran kabupaten/kota di Provinsi Lampung periode 2019-2024?
2. Bagaimana pengaruh Belanja Daerah terhadap Realisasi Anggaran kabupaten/kota di Provinsi Lampung periode 2019-2024?
3. Bagaimana pengaruh Pembiayaan Daerah terhadap Realisasi Anggaran kabupaten/kota di Provinsi Lampung periode 2019-2024?
4. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk sebagai variabel kontrol terhadap Realisasi Anggaran kabupaten/kota di Provinsi Lampung periode 2019-2024?
5. Bagaimana pengaruh simultan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah, dan Jumlah Penduduk terhadap Realisasi Anggaran kabupaten/kota di Provinsi Lampung periode 2019-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh pendapatan daerah terhadap realisasi anggaran kabupaten/kota di Provinsi Lampung periode 2019-2024.
2. Menganalisis pengaruh belanja daerah terhadap realisasi anggaran kabupaten/kota di Provinsi Lampung periode 2019-2024.
3. Menganalisis pengaruh pembiayaan daerah terhadap realisasi anggaran kabupaten/kota di Provinsi Lampung periode 2019-2024.
4. Menganalisis pengaruh jumlah penduduk sebagai variabel kontrol terhadap realisasi anggaran kabupaten/kota di Provinsi Lampung periode 2019-2024.
5. Menguji pengaruh simultan pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, dan jumlah penduduk terhadap realisasi anggaran kabupaten/kota di Provinsi Lampung periode 2019-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1.3.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian administrasi publik, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Integrasi teori keuangan publik (Musgrave, 1959), *fiscal federalism* (Oates, 1999), dan akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2018) diharapkan memperkaya literatur mengenai hubungan antara dimensi fiskal dan kinerja realisasi anggaran. Penelitian ini juga memberikan perspektif baru dengan memasukkan faktor demografis sebagai variabel kontrol dalam analisis keuangan daerah.

1.3.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah daerah, khususnya kabupaten/kota di Provinsi Lampung, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik serta membantu pemerintah daerah dalam mempertimbangkan faktor jumlah penduduk sebagai variabel penting dalam perencanaan anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keuangan Publik

Teori keuangan publik merupakan salah satu pilar utama dalam ilmu ekonomi dan administrasi publik yang membahas bagaimana pemerintah memperoleh, mengelola, dan mendistribusikan sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kajian ini mencakup seluruh aktivitas fiskal pemerintah yang meliputi penghimpunan pendapatan, pengalokasian belanja, dan pengelolaan pembiayaan. Menurut Musgrave dan Musgrave (1989), keuangan publik tidak sekadar aktivitas akuntansi negara, tetapi merupakan instrumen kebijakan yang menentukan arah pembangunan sosial, politik, dan ekonomi. Perspektif ini menempatkan keuangan publik sebagai elemen fundamental dalam membangun legitimasi pemerintah di mata masyarakat.

Pengelolaan keuangan publik dibedakan dari keuangan privat karena tujuannya tidak hanya mengejar efisiensi ekonomi, melainkan juga menciptakan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Pemerintah sebagai entitas publik dituntut mengalokasikan sumber daya secara optimal, sekaligus memastikan distribusi hasil pembangunan secara adil. Hal ini menjadikan teori keuangan publik relevan untuk menganalisis bagaimana pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, serta jumlah penduduk memengaruhi realisasi anggaran.

Kerangka dasar teori keuangan publik diperkenalkan secara komprehensif oleh Richard A. Musgrave melalui tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi mengacu pada peran pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan oleh mekanisme pasar. Pemerintah daerah harus mampu

merencanakan dan merealisasikan anggaran belanja agar tercipta efisiensi dalam penyediaan layanan publik. Fungsi distribusi menekankan peran fiskal untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, termasuk melalui kebijakan subsidi, bantuan sosial, serta pemerataan pembangunan antar wilayah. Fungsi stabilisasi menggarisbawahi peran anggaran sebagai instrumen menjaga stabilitas ekonomi, baik dalam aspek inflasi, pengangguran, maupun pertumbuhan ekonomi (Musgrave, 1959).

Pendapatan daerah merupakan elemen penting dalam konteks teori keuangan publik. Tingginya pendapatan asli daerah (PAD) mencerminkan kemandirian fiskal suatu pemerintah daerah. Mahmudi (2019) menjelaskan bahwa PAD berfungsi sebagai indikator kapasitas fiskal yang menentukan ruang gerak daerah dalam membiayai pembangunan. Pemerintah daerah yang mampu meningkatkan PAD memiliki peluang lebih besar untuk merealisasikan anggaran secara optimal, sehingga kualitas pelayanan publik meningkat. Namun, fenomena di banyak daerah menunjukkan ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat. Ketergantungan ini menimbulkan risiko fiskal, terutama ketika transfer dana mengalami keterlambatan atau tidak sesuai kebutuhan daerah.

Belanja daerah berperan sebagai sarana implementasi fungsi alokasi dan distribusi. Pemerintah daerah harus memastikan struktur belanja mampu menjawab kebutuhan publik secara proporsional. Halim (2020) menekankan bahwa struktur belanja yang sehat adalah belanja yang menyeimbangkan belanja operasional dan belanja modal. Porsi belanja modal yang besar mampu meningkatkan produktivitas jangka panjang karena menghasilkan infrastruktur dan aset publik yang mendukung pembangunan. Rendahnya realisasi belanja modal sering dikaitkan dengan lemahnya perencanaan dan kapasitas birokrasi, yang berimplikasi pada rendahnya serapan anggaran.

Pembiayaan daerah terkait langsung dengan fungsi stabilisasi. Defisit yang muncul dalam APBD dapat ditutupi dengan pembiayaan melalui pinjaman daerah, pemanfaatan SILPA, atau pembentukan dana cadangan. Santosa (2020) menemukan bahwa pembiayaan yang dikelola dengan baik mampu

meningkatkan ketepatan realisasi anggaran. Namun, pengelolaan pembiayaan daerah seringkali masih konservatif. Banyak pemerintah daerah memilih menumpuk SILPA daripada menggunakannya untuk pembangunan produktif, sehingga realisasi anggaran menjadi tidak maksimal. Kondisi ini mencerminkan adanya deviasi antara potensi fiskal dengan kinerja aktual realisasi anggaran.

Jumlah penduduk sebagai faktor demografis juga relevan dalam kerangka teori keuangan publik. Rodríguez-Pose dan Ezcurra (2010) menegaskan bahwa pertumbuhan populasi meningkatkan kebutuhan layanan publik dan menambah beban fiskal daerah. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula tuntutan terhadap alokasi belanja pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur. Dalam konteks APBD, jumlah penduduk menjadi variabel penting yang memengaruhi sejauh mana perencanaan dan realisasi anggaran dapat berjalan seimbang. Daerah dengan populasi besar harus memiliki kapasitas fiskal yang memadai, jika tidak maka deviasi antara rencana dan realisasi anggaran akan semakin melebar.

Perkembangan teori keuangan publik tidak dapat dilepaskan dari dinamika paradigma administrasi publik. Pada era klasik, pengelolaan keuangan publik lebih berorientasi pada kepatuhan prosedural. Namun, sejak reformasi sektor publik dan penerapan prinsip good governance, teori keuangan publik semakin menekankan aspek transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Mardiasmo (2018) menambahkan bahwa pengelolaan anggaran yang akuntabel merupakan cerminan dari legitimasi pemerintah daerah. Realisasi anggaran tidak hanya mencerminkan kinerja teknis, tetapi juga kualitas tata kelola pemerintahan.

Kritik terhadap teori keuangan publik menyoroti sifat normatifnya yang mengasumsikan pemerintah selalu bertindak rasional. Realitas di lapangan menunjukkan adanya keterbatasan birokrasi, lemahnya perencanaan, serta kepentingan politik yang sering memengaruhi implementasi anggaran. Keterbatasan kapasitas SDM dan rendahnya kualitas data perencanaan juga menjadi faktor yang menghambat pencapaian target realisasi. Oleh karena itu, teori keuangan publik perlu diperkaya dengan teori-teori lain seperti fiscal

federalism, akuntabilitas publik, dan New Public Management yang menekankan aspek desentralisasi, transparansi, serta efisiensi birokrasi.

Relevansi teori keuangan publik dalam penelitian ini terletak pada kemampuannya menjelaskan hubungan antara variabel fiskal dan variabel demografis dengan realisasi anggaran. Pendapatan daerah berfungsi sebagai dasar kapasitas fiskal, belanja daerah mencerminkan kebijakan alokasi dan distribusi, pembiayaan daerah menunjukkan instrumen stabilisasi, sementara jumlah penduduk menggambarkan skala kebutuhan fiskal. Interaksi keempat variabel tersebut menentukan sejauh mana rencana anggaran dapat direalisasikan secara efektif. Dengan demikian, teori keuangan publik memberikan kerangka konseptual yang kuat dalam menganalisis faktor-faktor penentu realisasi APBD kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Pengelolaan keuangan publik di Indonesia mengalami transformasi besar sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan luas bagi pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, termasuk dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi ini menempatkan teori keuangan publik sebagai kerangka penting untuk memahami dinamika pengelolaan keuangan daerah.

Kebijakan desentralisasi fiskal memperkuat relevansi fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang diperkenalkan Musgrave. Fungsi alokasi menjadi semakin krusial karena pemerintah daerah dituntut menyediakan layanan publik sesuai kebutuhan masyarakat lokal. Fungsi distribusi semakin penting untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah, mengingat terdapat perbedaan kapasitas fiskal yang signifikan antar kabupaten/kota. Fungsi stabilisasi menjadi tantangan karena fluktuasi penerimaan daerah, terutama ketergantungan terhadap dana transfer, seringkali menimbulkan deviasi antara rencana dan realisasi anggaran.

Fenomena ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi APBD menjadi isu penting dalam praktik keuangan publik daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK, 2022) mencatat banyak daerah mengalami deviasi anggaran, baik berupa under-spending (serapan rendah) maupun over-spending pada pos tertentu. Rendahnya realisasi belanja modal di banyak daerah menunjukkan adanya masalah kelembagaan, perencanaan, dan implementasi. Kondisi ini menguatkan pandangan bahwa teori keuangan publik harus dipahami secara komprehensif, tidak hanya dari sisi normatif tetapi juga empiris.

Pendapatan daerah masih menjadi titik lemah dalam struktur fiskal daerah di Indonesia. Data Kementerian Keuangan (2023) menunjukkan kontribusi rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah hanya sekitar 25-30 %, dengan ketergantungan yang tinggi pada dana transfer pusat. Kondisi ini membuat kapasitas fiskal daerah terbatas dan sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat. Dalam perspektif teori keuangan publik, ketergantungan pada transfer pusat mengurangi fleksibilitas daerah dalam melaksanakan fungsi alokasi dan distribusi, sehingga berimplikasi pada rendahnya realisasi anggaran.

Belanja daerah seringkali tidak mencerminkan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Struktur belanja yang didominasi oleh belanja pegawai menunjukkan bias administratif, sementara belanja modal yang seharusnya menopang pertumbuhan jangka panjang justru relatif kecil. Halim (2020) menekankan bahwa komposisi belanja yang sehat harus berorientasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik. Realisasi belanja yang rendah pada pos modal memperlihatkan lemahnya kapasitas birokrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Pembiayaan daerah juga menghadapi persoalan serius. Banyak daerah cenderung menumpuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) setiap tahun. Akumulasi SILPA yang tinggi menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Mahmudi (2019) menjelaskan bahwa SILPA yang besar seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk

menevaluasi kualitas perencanaan anggaran. Dalam kerangka teori keuangan publik, pembiayaan seharusnya berfungsi sebagai instrumen stabilisasi, bukan indikator kelemahan manajerial.

Jumlah penduduk memiliki pengaruh signifikan terhadap besaran kebutuhan fiskal. Daerah dengan populasi besar menghadapi tekanan fiskal lebih tinggi karena permintaan pelayanan publik yang lebih kompleks. BPS (2023) mencatat jumlah penduduk keseluruhan kabupaten/kota di Provinsi Lampung mencapai lebih dari 9,2 juta jiwa, dengan konsentrasi tertinggi di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Tekanan populasi ini memunculkan tantangan dalam realisasi anggaran, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Rodríguez-Pose dan Ezcurra (2010) menunjukkan bahwa populasi menjadi faktor kunci yang menjelaskan perbedaan kapasitas realisasi anggaran antar daerah.

Keterkaitan antara teori keuangan publik dan penelitian empiris di Indonesia sudah banyak dikaji. Siregar (2017) menemukan bahwa kapasitas PAD berhubungan positif dengan tingkat realisasi anggaran belanja daerah. Penelitian Wulandari dan Hidayat (2020) menekankan peran dana perimbangan dalam mendukung realisasi belanja, meskipun ketergantungan yang tinggi justru berpotensi menurunkan akuntabilitas. Sari dan Pratama (2022) membuktikan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap realisasi anggaran di Sumatera Selatan, meskipun variabel belanja modal hanya berpengaruh parsial. Temuan-temuan ini memperkuat relevansi teori keuangan publik dalam menganalisis realisasi anggaran daerah.

Tantangan utama penerapan teori keuangan publik di Indonesia terletak pada kesenjangan antara teori normatif dan praktik birokrasi. Teori keuangan publik mengasumsikan adanya rasionalitas pemerintah dalam mengelola anggaran, sementara kenyataan di lapangan menunjukkan pengaruh politik anggaran, keterbatasan kapasitas SDM, serta lemahnya sistem pengendalian internal. Mardiasmo (2018) menekankan bahwa tanpa akuntabilitas dan transparansi, keuangan publik berpotensi menjadi alat politik, bukan instrumen kesejahteraan. Oleh karena itu, integrasi teori keuangan publik dengan teori

akuntabilitas publik, fiscal federalism, dan New Public Management menjadi penting untuk memberikan analisis yang lebih realistik.

Realisasi anggaran daerah pada akhirnya menjadi indikator keberhasilan implementasi teori keuangan publik. Tingkat realisasi yang tinggi menunjukkan pemerintah daerah mampu menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dengan baik. Sebaliknya, deviasi yang besar antara rencana dan realisasi anggaran mencerminkan kelemahan dalam manajemen fiskal. Penelitian ini menempatkan teori keuangan publik sebagai landasan konseptual utama untuk memahami pengaruh pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, dan jumlah penduduk terhadap realisasi APBD kabupaten/kota di Provinsi Lampung periode 2019-2024.

2.2 Teori Keuangan Publik Musgrave

Teori keuangan publik Musgrave dikembangkan oleh Richard A. Musgrave (1959) dan hingga kini menjadi salah satu kerangka teori paling berpengaruh dalam kajian ekonomi publik. Musgrave memandang bahwa peran pemerintah dalam mengelola keuangan negara tidak sekadar bersifat administratif, melainkan memiliki tujuan normatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerangka ini menekankan bahwa setiap aktivitas fiskal pemerintah-pendapatan, belanja, dan pembiayaan-memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi, pemerataan, dan efisiensi penyediaan barang publik.

Musgrave membagi fungsi keuangan publik menjadi tiga, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi mengacu pada tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan secara memadai oleh mekanisme pasar. Fungsi distribusi berhubungan dengan peran pemerintah dalam menciptakan pemerataan pendapatan dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi. Fungsi stabilisasi

berkaitan dengan peran pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi makro, termasuk mengendalikan inflasi, mengurangi pengangguran, dan menjaga pertumbuhan ekonomi.

Pendapatan daerah (X_1) memiliki kaitan erat dengan fungsi alokasi Musgrave. Kapasitas fiskal daerah sangat tergantung pada tingkat penerimaan yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, dan sumber lain yang sah. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar ruang fiskal pemerintah daerah untuk menyediakan layanan publik. Halim (2014) menegaskan bahwa ketersediaan pendapatan daerah yang memadai meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan dasar. Dalam kerangka Musgrave, pendapatan merupakan fondasi utama untuk memastikan bahwa fungsi alokasi dapat dijalankan secara optimal.

Belanja daerah (X_2) mencerminkan fungsi distribusi dan alokasi. Anggaran belanja adalah instrumen utama untuk mewujudkan pemerataan akses terhadap layanan publik. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa efektivitas belanja publik menjadi tolok ukur kualitas tata kelola anggaran. Realisasi belanja yang tinggi sekaligus tepat sasaran menandakan bahwa pemerintah berhasil melaksanakan fungsi distribusi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan yang merata. Sari dan Utama (2021) menambahkan bahwa belanja modal berhubungan positif dengan serapan anggaran, yang menunjukkan bahwa realisasi anggaran tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah dana yang tersedia, tetapi juga oleh efektivitas penggunaannya.

Pembiayaan daerah (X_3) berkaitan dengan fungsi stabilisasi. Dalam kondisi defisit, pemerintah daerah menggunakan pembiayaan seperti pinjaman atau pemanfaatan SILPA untuk menjaga keberlangsungan anggaran. Santosa (2020) menunjukkan bahwa pembiayaan yang dikelola dengan baik dapat mengurangi risiko deviasi antara rencana dan realisasi anggaran. Perspektif Musgrave menegaskan bahwa instrumen pembiayaan merupakan alat untuk menjaga stabilitas fiskal, sehingga anggaran tetap dapat dijalankan meski menghadapi keterbatasan penerimaan.

Jumlah penduduk (X_4) dapat dijelaskan melalui fungsi alokasi dan distribusi Musgrave. Populasi yang besar menimbulkan kebutuhan pelayanan publik yang lebih kompleks, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur. Rodríguez-Pose dan Ezcurra (2010) menegaskan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk menciptakan tekanan fiskal, karena pemerintah harus meningkatkan belanja agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Dalam kerangka Musgrave, jumlah penduduk memengaruhi besarnya tuntutan fiskal yang harus diakomodasi pemerintah, sekaligus menentukan sejauh mana belanja dapat didistribusikan secara merata.

Realisasi anggaran (Y) dalam teori Musgrave dipahami sebagai hasil akhir dari interaksi tiga fungsi keuangan publik. Tingkat realisasi mencerminkan sejauh mana pendapatan mampu mendukung fungsi alokasi, belanja mencerminkan fungsi distribusi, dan pembiayaan mendukung fungsi stabilisasi. Ketiga fungsi tersebut tidak dapat dipisahkan karena bersama-sama menentukan keberhasilan pemerintah dalam menjalankan APBD.

Teori Musgrave relevan diterapkan dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan hubungan variabel fiskal (pendapatan, belanja, pembiayaan) dan variabel demografis (jumlah penduduk) terhadap realisasi anggaran. Pendekatan ini lebih komprehensif dibanding teori lain yang hanya fokus pada salah satu aspek, misalnya efisiensi (New Public Management), desentralisasi (fiscal federalism), atau transparansi (akuntabilitas publik). Musgrave memberikan kerangka menyeluruh bahwa realisasi anggaran adalah hasil dari fungsi ekonomi publik yang saling berkaitan.

Beberapa penelitian mendukung penerapan teori ini. Anggraeni dan Risnawati (2024) menunjukkan bahwa perencanaan anggaran yang baik mampu meningkatkan realisasi penggunaan anggaran. Wulandari dan Hidayat (2020) membuktikan bahwa PAD dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap realisasi anggaran belanja. Sari dan Pratama (2022) menegaskan peran jumlah penduduk dalam memengaruhi realisasi APBD. Penelitian-penelitian tersebut mengindikasikan bahwa fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi Musgrave memang tercermin dalam praktik pengelolaan anggaran daerah.

Konteks kabupaten/kota di Provinsi Lampung semakin mempertegas relevansi teori Musgrave. Selama periode 2019-2024, banyak kabupaten/kota menghadapi deviasi antara rencana dan realisasi anggaran. Kondisi ini tidak hanya disebabkan oleh aspek teknis perencanaan, tetapi juga karena ketidakseimbangan antara pendapatan yang diperoleh, kebutuhan belanja yang meningkat akibat jumlah penduduk, serta keterbatasan pembiayaan untuk menutup defisit. Musgrave menawarkan kerangka konseptual yang tepat untuk memahami hubungan kompleks ini secara sistematis.

Dengan demikian, teori keuangan publik Musgrave menjadi teori utama dalam penelitian ini. Teori ini memberikan justifikasi bahwa variabel pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, dan jumlah penduduk secara bersama-sama memengaruhi realisasi anggaran. Kerangka Musgrave memungkinkan penelitian ini menguji hubungan kausal antarvariabel melalui pendekatan kuantitatif, serta memberikan kontribusi teoretis dalam memperkuat pemahaman mengenai pengelolaan APBD di tingkat daerah.

2.2.1 Hubungan Teori Musgrave dengan Variabel Penelitian

a. Hubungan Pendapatan Daerah (X_1) terhadap Realisasi Anggaran (Y)

Pendapatan daerah merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan dan menjadi instrumen dalam fungsi alokasi Musgrave. Semakin tinggi pendapatan (baik dari PAD, dana transfer, maupun lain-lain pendapatan sah), semakin besar pula kapasitas fiskal daerah dalam membiayai program publik. Menurut Mahmudi (2019), tingginya pendapatan daerah memperluas ruang fiskal sehingga peluang realisasi anggaran tercapai sesuai target. Hal ini juga didukung penelitian Anggraeni & Risnawati (2024) yang menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap realisasi APBD. Dengan demikian, pendapatan daerah diduga memiliki pengaruh positif terhadap realisasi anggaran.

b. Hubungan Belanja Daerah (X_2) terhadap Realisasi Anggaran (Y)

Belanja daerah merupakan instrumen utama dalam menjalankan fungsi alokasi sekaligus distribusi Musgrave. Alokasi belanja digunakan untuk menyediakan layanan publik, sedangkan fungsi distribusi memastikan manfaat belanja dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat. Realisasi belanja yang optimal mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam program nyata. Halim (2020) menyatakan bahwa efektivitas belanja daerah menjadi indikator keberhasilan tata kelola fiskal. Oleh karena itu, semakin besar belanja yang terealisasi dengan baik, semakin tinggi pula tingkat realisasi anggaran.

c. Hubungan Pembiayaan Daerah (X_3) terhadap Realisasi Anggaran (Y)

Pembiayaan daerah berhubungan langsung dengan fungsi stabilisasi Musgrave. Dalam kondisi defisit, pembiayaan diperlukan untuk menutup kekurangan agar pembangunan tetap berjalan. Dalam kondisi surplus, pembiayaan memastikan dana dapat dimanfaatkan secara produktif. Menurut Harun & Robinson (2021), pengelolaan pembiayaan yang efektif berkontribusi pada keberlangsungan program daerah. Oleh sebab itu, pembiayaan daerah diduga berpengaruh positif terhadap realisasi anggaran.

d. Hubungan Jumlah Penduduk (X_4) terhadap Realisasi Anggaran (Y)

Jumlah penduduk berkaitan dengan fungsi alokasi dan distribusi Musgrave. Pertumbuhan penduduk meningkatkan kebutuhan layanan publik (pendidikan, kesehatan, infrastruktur), yang menuntut kapasitas fiskal lebih besar. Rodríguez-Pose & Ezcurra (2010) menegaskan bahwa jumlah penduduk merupakan variabel penting dalam menentukan besarnya beban fiskal daerah. Dengan

demikian, semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula kebutuhan realisasi anggaran.

e. Hubungan Simultan X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4 terhadap Y

Keempat variabel independen-pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, dan jumlah penduduk-secara simultan memengaruhi realisasi anggaran. Menurut Musgrave (1959), keberhasilan pengelolaan fiskal ditentukan oleh interaksi fungsi alokasi (pendapatan dan belanja), distribusi (belanja dan kebutuhan penduduk), serta stabilisasi (pembiayaan). Oleh karena itu, analisis simultan diperlukan untuk mengetahui sejauh mana keempat variabel secara bersama-sama memengaruhi realisasi anggaran daerah.

2.3 Teori Fiscal Federalism

Teori fiscal federalism memberikan kerangka konseptual penting dalam memahami bagaimana kewenangan fiskal dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oates (1999) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal merupakan mekanisme yang dapat meningkatkan efisiensi penyediaan layanan publik karena pemerintah daerah dianggap memiliki informasi lebih baik tentang kebutuhan masyarakat di wilayahnya dibandingkan pemerintah pusat. Perspektif ini menekankan bahwa pendeklasian kewenangan fiskal bukan hanya masalah administratif, melainkan strategi untuk mendekatkan kebijakan publik pada masyarakat.

Fiscal federalism berangkat dari tiga pilar utama: pembagian kewenangan (*assignment of functions*), desentralisasi penerimaan (*revenue decentralization*), dan transfer fiskal antar tingkat pemerintahan (*intergovernmental transfers*). Pertama, pembagian kewenangan menekankan pentingnya kejelasan urusan apa saja yang menjadi tanggung jawab pusat dan

daerah. Kedua, desentralisasi penerimaan menyangkut pemberian kewenangan bagi daerah untuk memungut pajak atau sumber pendapatan lain. Ketiga, transfer fiskal diperlukan untuk mengatasi ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah. Ketiga pilar tersebut saling terkait dan menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Relevansi teori fiscal federalism terhadap penelitian ini dapat dilihat dari cara variabel-variabel fiskal bekerja dalam sistem keuangan daerah. Pendapatan daerah (X_1) merupakan cerminan kapasitas fiskal yang tersedia bagi pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan. Dalam perspektif fiscal federalism, PAD yang kuat menunjukkan otonomi fiskal yang tinggi, sedangkan ketergantungan pada transfer pusat menandakan lemahnya kemandirian fiskal. Belanja daerah (X_2) menunjukkan bagaimana otoritas fiskal digunakan untuk merealisasikan prioritas pembangunan lokal. Belanja daerah yang efektif menjadi bukti bahwa desentralisasi fiskal berjalan dengan baik. Pembiayaan daerah (X_3) menegaskan pentingnya strategi fiskal jangka pendek dalam menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran, yang juga merupakan bagian dari tanggung jawab otonomi fiskal daerah. Jumlah penduduk (X_4) memunculkan tantangan tambahan, karena semakin besar populasi, semakin kompleks pula kebutuhan fiskal yang harus dipenuhi pemerintah daerah.

Penerapan fiscal federalism di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-undang ini menekankan bahwa hubungan fiskal antara pusat dan daerah harus didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Transfer fiskal dari pemerintah pusat ke daerah diwujudkan dalam bentuk Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil) serta Dana Otonomi Khusus. Mekanisme ini bertujuan mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah, karena kapasitas PAD di Indonesia sangat bervariasi.

Kabupaten/kota di Provinsi Lampung menjadi contoh nyata bagaimana teori fiscal federalism beroperasi dalam praktik. Sebagian besar kabupaten/kota di Lampung masih bergantung pada transfer fiskal pusat, terutama Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). BPS (2023) melaporkan bahwa PAD hanya berkontribusi sekitar 15-25% dari total pendapatan daerah, jauh lebih kecil dibandingkan kontribusi dana transfer. Ketergantungan ini membuat fleksibilitas fiskal daerah terbatas, sehingga deviasi antara rencana dan realisasi APBD sering terjadi. Misalnya, keterlambatan penyaluran DAK menyebabkan sejumlah proyek pembangunan mengalami penundaan, yang pada akhirnya menurunkan realisasi belanja daerah.

Bird dan Vaillancourt (2006) menegaskan bahwa keberhasilan desentralisasi fiskal sangat ditentukan oleh kapasitas fiskal daerah dalam mengelola sumber pendapatan sendiri. Martinez-Vazquez dan McNab (2003) juga menunjukkan bahwa daerah dengan otonomi fiskal lebih besar cenderung memiliki kinerja anggaran yang lebih baik, termasuk dalam hal realisasi. Hasil-hasil penelitian tersebut memperkuat relevansi teori fiscal federalism dalam memahami perbedaan kinerja realisasi APBD antar kabupaten/kota.

Fungsi belanja daerah dalam kerangka fiscal federalism juga menjadi perhatian penting. Oates (1972) menjelaskan bahwa desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah menyesuaikan belanjanya sesuai dengan preferensi masyarakat lokal. Namun, kondisi di Indonesia menunjukkan adanya fenomena "flypaper effect", di mana dana transfer dari pusat cenderung langsung dibelanjakan tanpa disesuaikan secara optimal dengan kebutuhan lokal. Fenomena ini menyebabkan belanja daerah kurang efektif dalam meningkatkan kualitas layanan publik, dan seringkali realisasinya jauh dari target.

Pembiayaan daerah tidak terlepas dari dinamika fiscal federalism. Dalam konteks otonomi fiskal, daerah seharusnya memiliki keleluasaan untuk menggunakan instrumen pembiayaan, seperti pinjaman daerah atau pemanfaatan SILPA. Akan tetapi, keterbatasan regulasi dan kapasitas manajerial sering membuat pembiayaan hanya menjadi formalitas pencatatan,

bukan instrumen stabilisasi fiskal sebagaimana yang ditekankan oleh Musgrave. Santosa (2020) menyatakan bahwa pembiayaan yang dikelola secara proaktif dapat memperbaiki deviasi anggaran, tetapi syaratnya adalah adanya transparansi dan disiplin fiskal.

Jumlah penduduk sebagai faktor demografis juga dapat dibaca melalui kerangka fiscal federalism. Daerah dengan jumlah penduduk tinggi menghadapi kebutuhan fiskal lebih besar, namun kapasitas fiskalnya tidak selalu sebanding. Kondisi ini menimbulkan fiscal gap yang harus ditutup melalui transfer pusat. Rodríguez-Pose dan Ezcurra (2010) menemukan bahwa ketidakseimbangan antara kebutuhan fiskal akibat pertumbuhan populasi dan kapasitas fiskal daerah seringkali memperburuk deviasi antara rencana dan realisasi anggaran.

Tantangan penerapan fiscal federalism di Indonesia, termasuk di Lampung, terletak pada ketidakmerataan kapasitas fiskal antar daerah. Kabupaten/kota dengan basis ekonomi kuat seperti Kota Bandar Lampung atau Kota Metro cenderung memiliki PAD yang lebih tinggi, sehingga lebih mampu merealisasikan anggaran. Sebaliknya, daerah dengan basis ekonomi lemah, seperti Kabupaten Mesuji atau Kabupaten Pesisir Barat, sangat bergantung pada transfer pusat sehingga rawan mengalami deviasi anggaran. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa prinsip keadilan dalam fiscal federalism belum sepenuhnya tercapai.

Dalam perspektif penelitian ini, teori fiscal federalism memperkuat pemahaman tentang bagaimana variabel pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, dan jumlah penduduk saling berkaitan dengan realisasi APBD. Teori ini juga membantu menjelaskan mengapa deviasi anggaran di Lampung terjadi secara berulang. Ketergantungan pada dana transfer, lemahnya PAD, serta tingginya kebutuhan fiskal akibat pertumbuhan penduduk menciptakan tekanan pada kemampuan daerah untuk merealisasikan anggaran sesuai rencana.

Keterbatasan teori fiscal federalism terletak pada sifat normatifnya yang mengasumsikan bahwa desentralisasi otomatis meningkatkan efisiensi. Dalam praktiknya, desentralisasi fiskal di Indonesia sering diwarnai oleh moral hazard,

politik anggaran, serta rendahnya akuntabilitas. Oleh karena itu, teori ini perlu dilengkapi dengan teori akuntabilitas publik dan New Public Management yang menekankan transparansi, efisiensi, dan orientasi pada hasil. Integrasi antara teori fiscal federalism dan teori keuangan publik Musgrave memberikan kerangka yang lebih utuh dalam memahami persoalan realisasi APBD kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

2.3 Teori New Public Management

New Public Management (NPM) muncul pada akhir 1970-an dan awal 1980-an sebagai respons terhadap kelemahan paradigma administrasi publik tradisional yang dianggap terlalu birokratis, lamban, dan tidak efisien. Konsep ini menekankan perlunya reformasi dalam pengelolaan sektor publik dengan mengadopsi prinsip-prinsip manajemen sektor swasta, seperti orientasi pada hasil, efisiensi biaya, inovasi pelayanan, dan akuntabilitas kinerja. Osborne dan Gaebler (1992) dalam karya monumental *Reinventing Government* menjelaskan bahwa pemerintahan modern tidak cukup hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga harus berperan sebagai organisasi yang berorientasi pada kinerja dan kepuasan publik.

NPM didasarkan pada keyakinan bahwa sektor publik dapat ditingkatkan kualitasnya melalui penerapan mekanisme pasar, kompetisi, dan insentif berbasis kinerja. Hood (1991) menyebutkan enam doktrin utama NPM, yaitu: profesionalisme manajerial, standar kinerja yang jelas, penekanan pada hasil dan output, desentralisasi kewenangan, kompetisi dalam pemberian layanan, serta pengendalian biaya. Doktrin-doktrin ini diharapkan mampu mengurangi pemborosan, meningkatkan transparansi, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Teori NPM sangat relevan dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait realisasi anggaran. Realisasi anggaran tidak hanya dipandang

sebagai proses teknis serapan dana, melainkan juga sebagai indikator sejauh mana pemerintah daerah berhasil mencapai tujuan pembangunan dengan efisien dan efektif. Mahmudi (2019) menegaskan bahwa paradigma NPM menuntut pemerintah untuk mengelola anggaran berbasis kinerja, di mana setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat diukur kontribusinya terhadap output dan outcome pembangunan.

Pendapatan daerah (X_1) dalam kerangka NPM dipandang sebagai indikator kapasitas pemerintah daerah untuk membiayai program pembangunan. Namun, NPM menekankan bahwa tingginya pendapatan tidak otomatis mencerminkan keberhasilan, melainkan bagaimana pendapatan tersebut dikelola untuk menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat. Halim (2014) menyatakan bahwa dalam paradigma NPM, keberhasilan pengelolaan pendapatan daerah tidak hanya diukur dari jumlah penerimaan, tetapi juga dari efektivitas pemanfaatannya dalam mendukung outcome pembangunan.

Belanja daerah (X_2) merupakan instrumen utama dalam implementasi NPM. Paradigma ini menuntut agar belanja pemerintah dialokasikan pada program yang memberikan manfaat nyata dan dapat diukur melalui indikator kinerja. Belanja tidak boleh hanya fokus pada input (jumlah dana yang dianggarkan), tetapi juga harus memperhatikan output (hasil kegiatan) dan outcome (manfaat bagi masyarakat). Sari dan Utama (2021) menegaskan bahwa serapan belanja modal yang efektif berhubungan signifikan dengan tingkat realisasi anggaran, dan hal ini sesuai dengan prinsip NPM yang berorientasi pada hasil.

Pembiayaan daerah (X_3) dalam perspektif NPM dipahami sebagai strategi manajerial untuk menjaga keberlanjutan fiskal. NPM menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan pembiayaan, baik berupa pinjaman daerah maupun pemanfaatan SILPA. Santosa (2020) menunjukkan bahwa pembiayaan yang dikelola dengan prinsip efisiensi dan transparansi mampu meningkatkan efektivitas realisasi anggaran, karena setiap penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hasil yang dicapai.

Jumlah penduduk (X_4) dalam kerangka NPM dipandang sebagai faktor eksternal yang menentukan skala kebutuhan pelayanan publik. Paradigma NPM

menuntut pemerintah daerah untuk lebih responsif dalam menyesuaikan belanja dengan dinamika demografi. Daerah dengan populasi besar harus memastikan bahwa belanja diarahkan pada program prioritas yang langsung menjawab kebutuhan masyarakat. Rodríguez-Pose dan Ezcurra (2010) menekankan bahwa keberhasilan manajemen anggaran di daerah padat penduduk sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengoptimalkan sumber daya terbatas dengan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Keterkaitan antara NPM dengan realisasi anggaran terletak pada orientasi terhadap kinerja. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut menyerap anggaran sesuai target, tetapi juga memastikan bahwa realisasi tersebut memberikan manfaat nyata. Dalam konteks kabupaten/kota di Provinsi Lampung, deviasi antara rencana dan realisasi APBD sering menunjukkan lemahnya penerapan prinsip NPM, karena perencanaan anggaran tidak berbasis pada analisis kebutuhan yang nyata serta tidak diikuti dengan pengendalian kinerja yang kuat.

Penelitian terdahulu mendukung relevansi NPM dalam analisis realisasi anggaran. Prasetyo dan Lestari (2021) menemukan bahwa transparansi dan perencanaan anggaran yang akuntabel meningkatkan tingkat realisasi anggaran pemerintah daerah di Jawa Tengah. Hasil ini sejalan dengan prinsip NPM yang menekankan akuntabilitas, transparansi, dan orientasi hasil. Anggraeni dan Risnawati (2024) juga menegaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia dalam perencanaan anggaran sangat memengaruhi realisasi penggunaan anggaran, sebuah temuan yang memperlihatkan bagaimana kapasitas manajerial yang menjadi salah satu pilar NPM berperan penting dalam keberhasilan anggaran.

Kelebihan teori NPM adalah kemampuannya menjelaskan hubungan antara proses penganggaran dengan hasil yang diharapkan. Paradigma ini tidak hanya memandang anggaran sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai kontrak kinerja antara pemerintah dan masyarakat. Realisasi anggaran menjadi ukuran utama akuntabilitas pemerintah dalam paradigma NPM.

Keterbatasan teori NPM terletak pada kecenderungannya yang terlalu menekankan prinsip pasar dalam pengelolaan sektor publik. Tidak semua

layanan publik dapat dikelola dengan logika pasar atau efisiensi biaya, karena sektor publik memiliki tujuan sosial yang tidak selalu dapat diukur secara finansial. Selain itu, penerapan NPM sering kali terkendala oleh kapasitas sumber daya manusia dan sistem birokrasi yang masih tradisional.

Teori NPM memperkuat kerangka penelitian ini dengan menekankan pentingnya orientasi hasil dan akuntabilitas dalam realisasi anggaran. Pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, serta jumlah penduduk harus dipandang bukan hanya sebagai variabel fiskal dan demografis, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai outcome pembangunan yang lebih baik. Hubungan ini kemudian diintegrasikan dengan teori Musgrave, karena orientasi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam Musgrave hanya dapat tercapai apabila prinsip-prinsip manajemen modern seperti efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas NPM dijalankan dengan baik.

2.4 Teori Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik merupakan konsep fundamental dalam tata kelola pemerintahan modern. Pemerintah sebagai pemegang mandat dari masyarakat wajib mempertanggungjawabkan seluruh tindakan, kebijakan, serta penggunaan sumber daya publik secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Mardiasmo (2018) mendefinisikan akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak yang diberi amanah untuk menyajikan laporan yang benar, jujur, dan dapat diverifikasi kepada masyarakat sebagai pemberi amanah. Definisi ini menegaskan bahwa akuntabilitas tidak sekadar prosedural, melainkan mencakup integritas dan legitimasi dalam pengelolaan keuangan publik.

Romzek dan Dubnick (1987) menjelaskan empat dimensi akuntabilitas yang saling melengkapi. Dimensi birokratis menekankan kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur. Dimensi hukum menegaskan bahwa kebijakan dan

realisasi anggaran harus sesuai perundang-undangan. Dimensi profesional mencerminkan kompetensi aparatur dalam melaksanakan tugas. Dimensi politik menunjukkan keterlibatan dan pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Keempat dimensi ini menjadi kerangka analisis yang relevan dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu merealisasikan anggaran sesuai rencana.

Pendapatan daerah (X_1) memiliki keterkaitan erat dengan prinsip akuntabilitas publik. Proses perolehan PAD, pemanfaatan dana transfer, serta pengelolaan penerimaan lainnya harus dilakukan secara transparan. Mahmudi (2019) menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah dalam mengelola pendapatan publik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ketika masyarakat mengetahui bahwa sumber pendapatan dikelola dengan baik, legitimasi pemerintah akan menguat sehingga realisasi anggaran dapat berjalan lebih efektif.

Belanja daerah (X_2) menjadi instrumen utama dalam mencerminkan kualitas akuntabilitas publik. Alokasi belanja yang tepat dan realisasi anggaran yang tinggi menunjukkan adanya kesesuaian antara perencanaan dan implementasi. Sari dan Utama (2021) menemukan bahwa belanja modal yang dikelola dengan prinsip akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Penelitian ini menegaskan bahwa kualitas tata kelola anggaran dapat diukur melalui tingkat realisasi belanja, karena masyarakat menilai pemerintah dari seberapa nyata program pembangunan dijalankan.

Pembiayaan daerah (X_3) juga menuntut akuntabilitas tinggi. Pinjaman daerah dan penggunaan SILPA harus jelas tujuan, mekanisme, serta dampaknya terhadap keseimbangan fiskal. Santosa (2020) menyatakan bahwa pembiayaan yang transparan dan akuntabel mampu meningkatkan efektivitas realisasi APBD. Jika pembiayaan tidak dikelola dengan jelas, masyarakat akan kehilangan kepercayaan, yang pada akhirnya menimbulkan resistensi terhadap kebijakan pemerintah.

Jumlah penduduk (X_4) memperluas dimensi akuntabilitas publik. Pemerintah daerah dengan jumlah penduduk besar menghadapi tuntutan

pelayanan yang lebih kompleks. Rodríguez-Pose dan Ezcurra (2010) menegaskan bahwa peningkatan populasi akan meningkatkan beban fiskal. Kondisi ini memaksa pemerintah menunjukkan akuntabilitas yang lebih kuat, karena setiap deviasi antara rencana dan realisasi akan berdampak langsung pada kualitas layanan publik yang diterima oleh masyarakat luas.

Konteks kabupaten/kota di Provinsi Lampung memberikan ilustrasi nyata. Realisasi APBD sering kali lebih rendah dari target karena lemahnya pengendalian internal, keterlambatan perencanaan, dan kurangnya keterbukaan informasi. Fenomena ini menunjukkan adanya masalah akuntabilitas publik. Masyarakat Lampung sering mempertanyakan efektivitas program pembangunan, karena tidak jarang anggaran yang sudah direncanakan tidak terealisasi sesuai target. Keadaan ini memperlihatkan bahwa deviasi antara rencana dan realisasi tidak hanya masalah teknis, tetapi juga masalah akuntabilitas.

Teori akuntabilitas publik menegaskan bahwa realisasi anggaran adalah indikator kunci keberhasilan tata kelola pemerintahan. Tingkat serapan anggaran yang tinggi dan tepat sasaran mencerminkan komitmen pemerintah terhadap masyarakat. Sebaliknya, rendahnya realisasi anggaran menjadi sinyal lemahnya akuntabilitas yang dapat menurunkan legitimasi pemerintah daerah. Dalam konteks penelitian ini, teori akuntabilitas publik memperkuat pemahaman bahwa variabel-variabel fiskal tidak dapat dipisahkan dari dimensi transparansi, keterbukaan, dan pertanggungjawaban kepada publik.

Keterbatasan teori akuntabilitas publik terletak pada sifat normatifnya. Teori ini mengasumsikan bahwa aparatur pemerintah selalu rasional dan berkomitmen terhadap kepentingan publik. Realitas menunjukkan adanya moral hazard, kepentingan politik, serta keterbatasan kapasitas birokrasi yang sering menyebabkan deviasi anggaran. Oleh karena itu, teori ini perlu diintegrasikan dengan kerangka lain, termasuk teori New Public Management yang menekankan efisiensi dan orientasi pada hasil, serta teori keuangan publik Musgrave yang memberikan fondasi konseptual dalam hubungan antara fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi anggaran.

2.6 Teori Zero-Based Budgeting

Zero-Based Budgeting (ZBB) merupakan salah satu pendekatan dalam perencanaan dan penganggaran publik yang berkembang sejak tahun 1970-an. Konsep ini diperkenalkan pertama kali oleh Peter A. Pyhrr (1970) di Amerika Serikat, kemudian diadopsi secara luas dalam sektor publik maupun swasta. ZBB menekankan bahwa proses penyusunan anggaran harus dimulai dari titik nol, artinya setiap program, kegiatan, dan belanja yang diusulkan harus dianalisis ulang secara mendalam tanpa mengacu otomatis pada anggaran tahun sebelumnya.

Paradigma ZBB lahir sebagai kritik terhadap sistem penganggaran tradisional yang cenderung incremental, yakni menambah atau mengurangi anggaran berdasarkan alokasi tahun lalu tanpa mempertimbangkan relevansi dan efektivitas program. Sistem incremental membuat banyak program rutin terus mendapat alokasi meski sudah tidak relevan atau tidak produktif. Pyhrr (1970) menegaskan bahwa ZBB hadir untuk mendorong efisiensi, akuntabilitas, dan prioritas dalam penggunaan sumber daya publik.

Dalam ZBB, setiap unit organisasi diwajibkan menyusun decision package, yaitu dokumen yang berisi tujuan program, alternatif kegiatan, indikator kinerja, serta justifikasi kebutuhan anggaran. Decision package ini kemudian dievaluasi, diperengkat, dan dipilih berdasarkan tingkat prioritas serta ketersediaan sumber daya. Proses ini memungkinkan pemerintah mengalokasikan anggaran secara lebih objektif dan sesuai kebutuhan aktual.

Relevansi ZBB terhadap penelitian ini sangat besar karena menyangkut hubungan antara variabel fiskal (pendapatan, belanja, pembiayaan) dan variabel demografi (jumlah penduduk) dengan realisasi anggaran. Pendapatan daerah (X_1) dalam perspektif ZBB tidak hanya dipandang sebagai sumber daya keuangan, tetapi juga sebagai batas kapasitas yang menentukan seberapa besar program dapat dijalankan. Dengan pendekatan nol, setiap rupiah pendapatan harus dialokasikan berdasarkan analisis manfaat dan prioritas, bukan sekadar

melanjutkan alokasi lama. Halim (2014) menjelaskan bahwa pengelolaan pendapatan yang berbasis ZBB memungkinkan pemerintah daerah memastikan setiap penerimaan dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung realisasi program.

Belanja daerah (X_2) merupakan aspek yang paling langsung terkait dengan ZBB. Belanja pemerintah tidak lagi dialokasikan secara otomatis, melainkan melalui evaluasi kebutuhan setiap program. Paradigma ZBB menuntut adanya analisis biaya-manfaat untuk setiap kegiatan, sehingga belanja yang direncanakan benar-benar mencerminkan prioritas pembangunan. Mahmudi (2019) menegaskan bahwa prinsip ZBB membantu meningkatkan efisiensi belanja publik dengan mengeliminasi kegiatan yang tidak produktif. Dalam konteks realisasi anggaran, penerapan ZBB diharapkan mampu mengurangi deviasi antara rencana dan realisasi, karena setiap alokasi sudah melalui analisis mendalam sejak tahap perencanaan.

Pembiayaan daerah (X_3) dalam kerangka ZBB dipandang sebagai instrumen yang harus dikelola secara ketat. Setiap penggunaan pembiayaan, baik berupa pinjaman maupun pemanfaatan SILPA, harus didasarkan pada analisis manfaat yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Santosa (2020) menunjukkan bahwa daerah yang menerapkan prinsip efisiensi dan justifikasi dalam penggunaan pembiayaan cenderung lebih berhasil dalam menjaga stabilitas fiskal dan realisasi anggaran.

Jumlah penduduk (X_4) memiliki implikasi penting dalam penerapan ZBB. Bertambahnya jumlah penduduk meningkatkan kebutuhan pelayanan publik, yang berarti pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja. Rodríguez-Pose dan Ezcurra (2010) menekankan bahwa tekanan demografis menuntut adanya fleksibilitas fiskal. ZBB memberikan kerangka metodologis untuk menyesuaikan belanja dengan kebutuhan populasi secara objektif, sehingga alokasi anggaran lebih realistik dan implementasinya lebih mudah terealisasi.

Penerapan ZBB di sektor publik menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa penelitian menemukan bahwa ZBB mampu meningkatkan

akuntabilitas dan efisiensi. Pyhrr (1977) dalam studi lanjutan menekankan bahwa ZBB dapat mengurangi pemborosan karena setiap program diuji kelayakannya sejak awal. Penelitian oleh Stufflebeam (1983) menemukan bahwa ZBB efektif dalam meningkatkan kualitas keputusan anggaran karena setiap keputusan didasarkan pada analisis manfaat yang jelas. Namun, ada pula kritik terhadap ZBB yang dianggap membutuhkan sumber daya besar, waktu lama, dan kapasitas aparatur yang memadai untuk melakukan analisis menyeluruh.

Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip ZBB sebenarnya sudah mulai diadopsi melalui konsep performance-based budgeting yang menekankan hubungan antara anggaran dan kinerja. Mardiasmo (2018) menyebutkan bahwa pendekatan berbasis kinerja merupakan evolusi dari prinsip ZBB, di mana anggaran tidak lagi ditentukan oleh input, melainkan oleh hasil yang diharapkan.

Kabupaten/kota di Provinsi Lampung menghadapi permasalahan deviasi antara rencana dan realisasi anggaran, sehingga penerapan prinsip ZBB menjadi relevan. Banyak kabupaten/kota mengalami penyerapan anggaran rendah atau tidak sesuai target karena perencanaan masih bersifat incremental. Penerapan prinsip ZBB dapat mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap setiap program sebelum dialokasikan anggaran, sehingga realisasi lebih mudah dicapai karena program sudah benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.

Kelebihan teori ZBB adalah kemampuannya mengarahkan pemerintah untuk fokus pada program prioritas dan efisiensi penggunaan anggaran. Realisasi anggaran menjadi lebih terukur karena setiap rupiah yang dialokasikan sudah memiliki justifikasi manfaat. Namun, keterbatasannya terletak pada tuntutan analisis yang rumit dan potensi resistensi birokrasi. Aparatur daerah yang terbiasa dengan sistem incremental sering kesulitan beradaptasi dengan paradigma ZBB yang menuntut analisis mendalam.

Hubungan teori ZBB dengan teori Musgrave dapat dilihat dari fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi Musgrave dapat dicapai

melalui mekanisme ZBB yang memastikan setiap belanja publik dialokasikan secara efisien sesuai kebutuhan. Fungsi distribusi diperkuat karena ZBB menuntut prioritas pada program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga manfaat pembangunan lebih merata. Fungsi stabilisasi terwujud melalui pengelolaan pembiayaan yang berbasis analisis, sehingga keseimbangan fiskal tetap terjaga meski kebutuhan publik terus meningkat akibat pertumbuhan penduduk.

Integrasi ZBB dalam kerangka penelitian ini memberikan perspektif tambahan bahwa deviasi antara rencana dan realisasi anggaran dapat diminimalisasi melalui perencanaan berbasis nol. Dengan kata lain, realisasi anggaran bukan hanya persoalan teknis serapan, tetapi juga persoalan metodologis dalam penyusunan anggaran. Penerapan prinsip ZBB menegaskan bahwa realisasi yang baik merupakan hasil dari perencanaan yang benar-benar objektif dan responsif terhadap kebutuhan daerah.

2.7 Teori Demografi Fiskal

Teori demografi fiskal menempatkan jumlah penduduk dan struktur demografi sebagai faktor yang sangat menentukan dalam pengelolaan keuangan publik. Pemerintah daerah tidak hanya mengelola pendapatan dan belanja secara teknis, melainkan juga harus menyesuaikan kebijakan fiskal dengan kondisi populasi yang dihadapi. Pertumbuhan penduduk, distribusi usia, tingkat urbanisasi, serta kepadatan wilayah menciptakan dinamika kebutuhan layanan publik yang sangat beragam. Rodríguez-Pose dan Ezcurra (2010) menegaskan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk secara langsung meningkatkan permintaan terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan infrastruktur. Konsekuensinya, kapasitas fiskal pemerintah daerah harus disesuaikan agar tidak terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.

Demografi fiskal berakar pada pandangan bahwa anggaran publik bukan sekadar instrumen keuangan, tetapi juga respons sosial terhadap kebutuhan penduduk. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah, semakin besar pula kebutuhan fiskal yang harus dipenuhi. Daerah dengan pertumbuhan penduduk tinggi akan menghadapi tekanan anggaran karena peningkatan biaya penyediaan layanan publik berlangsung lebih cepat daripada pertumbuhan penerimaan. Sebaliknya, daerah dengan pertumbuhan penduduk rendah mungkin menghadapi tantangan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya karena skala ekonomi yang terbatas.

Pendapatan daerah (X_1) berhubungan erat dengan teori demografi fiskal. Populasi yang besar memberikan peluang lebih tinggi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi. Namun, peningkatan potensi pendapatan ini sering kali tidak sebanding dengan lonjakan kebutuhan belanja. Mahmudi (2019) menjelaskan bahwa daerah dengan populasi besar cenderung menghadapi dilema fiskal: meskipun memiliki potensi penerimaan tinggi, kebutuhan belanja yang lebih besar membuat realisasi anggaran menjadi tantangan tersendiri.

Belanja daerah (X_2) menjadi instrumen paling nyata dalam konteks demografi fiskal. Peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan alokasi anggaran untuk belanja pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pelayanan dasar lainnya. Sari dan Utama (2021) menunjukkan bahwa belanja modal yang diarahkan pada kebutuhan publik di daerah padat penduduk berhubungan positif dengan realisasi anggaran. Penelitian ini menegaskan bahwa dimensi demografi tidak dapat diabaikan ketika menganalisis keberhasilan belanja daerah, karena alokasi belanja yang tepat akan menentukan kualitas realisasi anggaran.

Pembiayaan daerah (X_3) juga memiliki keterkaitan dengan teori ini. Pertumbuhan penduduk sering kali menciptakan defisit anggaran karena belanja meningkat lebih cepat dibandingkan pendapatan. Pemerintah daerah kemudian mengandalkan pembiayaan melalui SILPA, pinjaman daerah, atau skema pembiayaan lain untuk menutup kesenjangan tersebut. Santosa (2020)

menegaskan bahwa pengelolaan pembiayaan yang tepat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas fiskal di daerah dengan jumlah penduduk besar, karena permintaan layanan publik akan terus meningkat seiring pertumbuhan populasi.

Jumlah penduduk (X_4) dalam penelitian ini berperan sebagai variabel kontrol yang sangat relevan. Rodríguez-Pose dan Ezcurra (2010) menyatakan bahwa jumlah penduduk tidak hanya memengaruhi kebutuhan belanja, tetapi juga memperbesar risiko deviasi antara rencana dan realisasi anggaran. Pemerintah daerah yang tidak mampu menyesuaikan perencanaan anggarannya dengan dinamika demografi cenderung menghadapi tingkat realisasi yang rendah. Variabel ini memberikan dimensi makro dalam analisis keuangan daerah, sehingga penelitian tidak hanya fokus pada aspek fiskal semata, tetapi juga pada faktor struktural yang memengaruhi kebutuhan fiskal.

Kondisi kabupaten/kota di Provinsi Lampung memberikan gambaran yang jelas tentang relevansi teori demografi fiskal. Badan Pusat Statistik (2023) mencatat jumlah penduduk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung lebih dari 9,2 juta jiwa dengan tingkat kepadatan yang tinggi di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Daerah dengan jumlah penduduk padat menghadapi tuntutan belanja yang besar untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sedangkan daerah dengan penduduk relatif kecil menghadapi tantangan keterbatasan pendapatan. Perbedaan ini menciptakan variasi signifikan dalam tingkat realisasi anggaran antar kabupaten/kota di Lampung.

Penelitian terdahulu juga menegaskan peran penting demografi dalam realisasi anggaran. Sari dan Pratama (2022) menemukan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap realisasi anggaran pemerintah daerah di Sumatera Selatan. Hasil ini memperkuat argumen bahwa faktor demografi perlu dimasukkan dalam analisis keuangan daerah. Dengan demikian, penelitian ini menambahkan variabel jumlah penduduk ke dalam model analisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai realisasi APBD di Lampung.

Keterbatasan teori demografi fiskal terletak pada kecenderungannya yang deterministik. Teori ini menekankan hubungan linear antara pertumbuhan

penduduk dengan kebutuhan fiskal, tanpa memperhitungkan variasi kapasitas kelembagaan dan inovasi kebijakan di setiap daerah. Pemerintah daerah dengan kapasitas manajerial tinggi mungkin mampu mengelola tekanan fiskal akibat pertumbuhan penduduk dengan lebih baik melalui inovasi kebijakan dan efisiensi belanja. Oleh karena itu, teori ini perlu diintegrasikan dengan kerangka lain yang menyoroti peran akuntabilitas, efisiensi, dan orientasi hasil, seperti New Public Management.

Teori demografi fiskal memperkuat kerangka penelitian dengan menunjukkan bahwa jumlah penduduk merupakan faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah, tetapi harus diakomodasi dalam perencanaan dan realisasi anggaran. Variabel jumlah penduduk dalam penelitian ini akan memberikan kontribusi penting untuk mengukur sejauh mana kapasitas fiskal pemerintah daerah Lampung mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan demografis yang terus berkembang. Analisis ini kemudian dihubungkan dengan kerangka Musgrave, karena jumlah penduduk berimplikasi langsung terhadap fungsi alokasi dan distribusi dalam teori keuangan publik Musgrave.

2.8 Penelitian Terdahulu yang Relevan

a. Penelitian oleh Anggraeni & Risnawati (2024)

Penelitian berjudul “*Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Realisasi Penggunaan Anggaran pada Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Jawa Barat*” menitikberatkan pada hubungan antara perencanaan anggaran dan kompetensi SDM dalam memengaruhi realisasi anggaran. Penelitian ini menggunakan teori kompetensi organisasi dan teori efektivitas manajemen publik dengan metode kuantitatif regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

perencanaan anggaran dan kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap realisasi anggaran.

Kesamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti perencanaan anggaran sebagai faktor penting dalam realisasi anggaran. Kekurangannya, penelitian ini terbatas pada level institusi (Polda Jawa Barat) dan tidak memperhitungkan faktor makro fiskal. Perbedaannya, penelitian ini menguji faktor fiskal utama (pendapatan, belanja, pembiayaan) serta jumlah penduduk kabupaten/kota di Provinsi Lampung, sehingga menghasilkan cakupan analisis yang lebih luas.

b. Penelitian oleh Wulandari & Hidayat (2020)

Penelitian “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Realisasi Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur*” berfokus pada peranan PAD dan dana transfer dalam memengaruhi realisasi belanja. Teori yang digunakan adalah fiscal federalism dengan metode regresi panel. Hasil penelitian membuktikan bahwa PAD dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap realisasi belanja. Kesamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel pendapatan daerah untuk melihat pengaruh terhadap realisasi. Kekurangannya, penelitian ini hanya terbatas pada dua variabel pendapatan tanpa memasukkan belanja daerah secara keseluruhan maupun faktor makro. Perbedaannya, penelitian ini memperluas model dengan menambahkan belanja, pembiayaan, serta jumlah penduduk sehingga analisis menjadi lebih komprehensif.

c. Penelitian oleh Sari & Pratama (2022)

Penelitian “*Pengaruh Jumlah Penduduk dan Belanja Modal terhadap Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan*” menyoroti jumlah penduduk sebagai faktor makro. Teori yang digunakan adalah teori demografi fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk

berpengaruh signifikan terhadap realisasi anggaran, sedangkan belanja modal hanya berpengaruh parsial.

Kesamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menempatkan jumlah penduduk sebagai determinan kebutuhan fiskal. Kekurangannya, penelitian ini terbatas pada jumlah penduduk dan belanja modal sehingga belum menguji variabel pendapatan dan pemberian. Perbedaannya, penelitian ini mengombinasikan jumlah penduduk dengan variabel fiskal utama sehingga menghasilkan gambaran lebih lengkap.

d. Penelitian oleh Hasanah & Yuliani (2019)

Penelitian “*Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Daerah dalam Peningkatan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan*” berlandaskan pada teori efektivitas anggaran dan efisiensi publik. Metodenya berupa analisis rasio efisiensi dan efektivitas anggaran. Hasil penelitian menunjukkan banyak kabupaten/kota di Kalimantan Selatan belum efektif dalam realisasi belanja.

Kesamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menilai realisasi anggaran sebagai tolok ukur kinerja. Kekurangannya, penelitian ini lebih menekankan analisis rasio dan tidak menguji faktor determinan menggunakan pendekatan ekonometrika. Perbedaannya, penelitian ini menggunakan regresi simultan dengan variabel pendapatan, belanja, pemberian, dan jumlah penduduk, sehingga lebih kuat secara metodologi.

e. Penelitian oleh Prasetyo & Lestari (2021)

Penelitian “*Pengaruh Perencanaan Anggaran, Belanja Daerah, dan Transparansi terhadap Realisasi Anggaran pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah*” menggunakan teori akuntabilitas publik dan good governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dan belanja daerah berpengaruh signifikan, dengan transparansi berperan sebagai variabel moderasi. Kesamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti pengaruh belanja daerah terhadap realisasi anggaran.

Kekurangannya, penelitian ini tidak menguji faktor pembiayaan dan jumlah penduduk. Perbedaannya, penelitian ini menambahkan pembiayaan dan jumlah penduduk sebagai variabel baru serta menggunakan konteks kabupaten/kota di Provinsi Lampung, sehingga novelty penelitian lebih jelas

Kajian penelitian terdahulu menunjukkan bahwa realisasi anggaran dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi fiskal maupun kelembagaan. Faktor keuangan yang sering dianalisis meliputi pendapatan asli daerah, dana transfer, belanja modal, dan pembiayaan daerah (Wulandari & Hidayat, 2020; Sari & Pratama, 2022). Faktor kelembagaan yang diteliti meliputi kompetensi sumber daya manusia, perencanaan anggaran, transparansi, serta akuntabilitas publik (Anggraeni & Risnawati, 2024; Prasetyo & Lestari, 2021). Hasil penelitian umumnya menegaskan bahwa faktor-faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap tingkat ketercapaian anggaran, meskipun metode analisis yang digunakan masih bervariasi, seperti regresi linier berganda maupun analisis rasio efisiensi (Hasanah & Yuliani, 2019).

Kesenjangan penelitian masih terlihat terutama pada aspek demografi. Jumlah penduduk jarang diposisikan sebagai variabel yang memengaruhi realisasi anggaran, meskipun secara teoritis populasi berkorelasi langsung dengan peningkatan kebutuhan belanja daerah. Daerah dengan jumlah penduduk besar menghadapi tekanan lebih tinggi terhadap penyediaan layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang pada akhirnya berdampak pada kapasitas realisasi APBD. Selain itu, kajian empiris mengenai realisasi anggaran kabupaten/kota di Provinsi Lampung masih terbatas, padahal data menunjukkan adanya deviasi signifikan antara rencana dan realisasi pada periode 2019-2024.

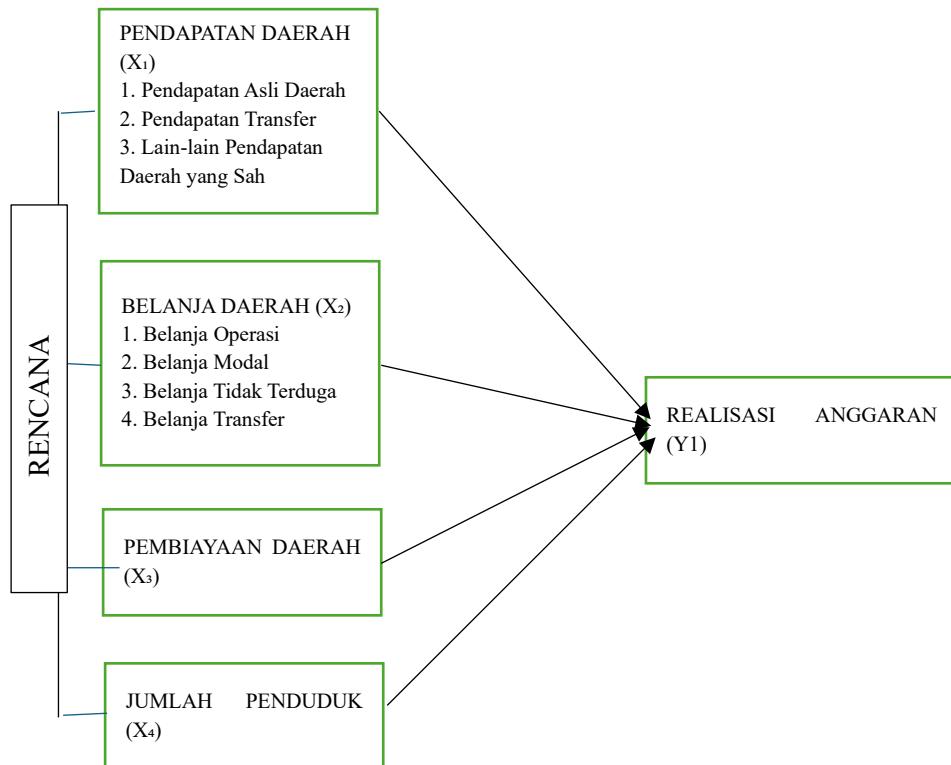
Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan variabel fiskal (pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah) serta variabel makro berupa jumlah penduduk dalam satu model analisis simultan. Jumlah penduduk diposisikan sebagai variabel kontrol yang menangkap pengaruh demografis

terhadap kebutuhan fiskal daerah. Fokus penelitian diarahkan pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung sehingga memberikan kontribusi empiris baru pada konteks wilayah yang masih jarang dikaji. Kerangka teoritik yang digunakan adalah teori keuangan publik Musgrave, yang relevan untuk menjelaskan hubungan antara kapasitas fiskal, alokasi belanja, serta kebutuhan distribusi dan stabilisasi dalam realisasi anggaran pemerintah daerah.

2.9 Kerangka Berfikir

Kerangka teoritik dalam penelitian ini dibangun berdasarkan Teori Keuangan Publik Musgrave (1959) yang menegaskan bahwa peran keuangan publik terbagi menjadi tiga fungsi utama: fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Kerangka ini memberikan landasan konseptual untuk menjelaskan keterkaitan antar variabel penelitian, yaitu Pendapatan Daerah (X_1), Belanja Daerah (X_2), Pembiayaan Daerah (X_3), Jumlah Penduduk (X_4), terhadap Realisasi Anggaran (Y).

Model kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pikiri

2.9.1 Pendapatan Daerah (X₁)

Pendapatan daerah merupakan seluruh penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber ekonomi lokal maupun transfer dari pemerintah pusat yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

- b. Dana Transfer, yang meliputi Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta transfer lainnya dari pemerintah pusat.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang bersumber dari penerimaan di luar PAD dan dana transfer, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Secara akademik, Mahmudi (2019) menjelaskan bahwa pendapatan daerah merupakan indikator kemandirian fiskal daerah dan mencerminkan kapasitas pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Tingginya tingkat PAD menunjukkan daerah memiliki basis ekonomi yang kuat.

Dalam kajian terbaru, Andriani & Pratama (2021) menegaskan bahwa kemampuan fiskal daerah yang tinggi, khususnya melalui peningkatan PAD, berhubungan positif dengan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah. Namun, ketergantungan pada dana transfer dari pusat masih menjadi fenomena umum di Indonesia, yang menunjukkan lemahnya kapasitas fiskal asli di sebagian besar daerah.

Fungsi Pendapatan Daerah:

- a. Menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan daerah.
- b. Indikator kemandirian fiskal.
- c. Menentukan ruang fiskal pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik.

2.9.2 Belanja Daerah (X₂)

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang mengurangi ekuitas dana, baik untuk kegiatan rutin maupun pembangunan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikategorikan ke dalam:

- a. Belanja Operasi (belanja pegawai, barang dan jasa, subsidi, hibah, dan bantuan sosial).
- b. Belanja Modal (pengadaan aset tetap seperti tanah, gedung, peralatan, infrastruktur).
- c. Belanja Tidak Terduga (pengeluaran mendesak seperti bencana alam).
- d. Belanja Transfer (diberikan ke desa atau lembaga lain sesuai aturan).

Secara akademik, Halim (2020) menegaskan bahwa belanja daerah merupakan instrumen utama untuk meningkatkan pelayanan publik, menstimulasi pertumbuhan ekonomi lokal, serta mempercepat pembangunan infrastruktur. Sementara itu, Sari & Kurniawan (2022) menunjukkan bahwa komposisi belanja modal yang proporsional lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dibanding belanja pegawai yang cenderung bersifat konsumtif.

Fungsi Belanja Daerah:

- a. Alat distribusi anggaran untuk memenuhi kebutuhan publik.
- b. Instrumen stabilisasi ekonomi di daerah.
- c. Sarana alokasi sumber daya pembangunan.

2.9.3 Pembiayaan Daerah (X₃)

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun berikutnya. Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, pembiayaan daerah meliputi:

- a. Penerimaan Pembiayaan, misalnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pencairan dana cadangan, dan pinjaman daerah.

- b. Pengeluaran Pembiayaan, misalnya pembentukan dana cadangan, penyertaan modal daerah, dan pembayaran pokok utang.

Secara akademik, Harun & Robinson (2021) menjelaskan bahwa pembiayaan daerah berfungsi sebagai instrumen fiskal yang dapat menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Lebih lanjut, Susanti (2020) menekankan bahwa pengelolaan pembiayaan yang efektif harus memperhatikan prinsip kehati-hatian fiskal agar tidak membebani APBD di masa depan melalui beban utang.

- b. Fungsi Pembiayaan Daerah:
- c. Menutup defisit anggaran.
- d. Mengelola surplus melalui SiLPA atau dana cadangan.
- e. Mendukung investasi pemerintah daerah.

2.9.4 Jumlah Penduduk (X₄)

Jumlah penduduk adalah keseluruhan orang yang berdomisili di suatu wilayah dalam periode tertentu, baik penduduk tetap maupun sementara. Menurut Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk merupakan indikator demografis utama yang memengaruhi kebutuhan layanan publik serta perencanaan pembangunan.

Dalam literatur akademik, Rodríguez-Pose & Ezcurra (2010) menjelaskan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk memiliki implikasi langsung terhadap kebutuhan fiskal pemerintah daerah, karena peningkatan jumlah penduduk mendorong meningkatnya permintaan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan sosial. Kajian Prasetyo & Adi (2021) juga menemukan bahwa jumlah penduduk yang besar akan meningkatkan kebutuhan belanja publik, sehingga berimplikasi terhadap besarnya realisasi anggaran.

Fungsi Jumlah Penduduk dalam penelitian:

- a. Indikator kebutuhan pelayanan publik.
- b. Faktor makro yang memengaruhi skala alokasi anggaran.

- c. Variabel kontrol dalam analisis realisasi APBD.

Indikator Jumlah Penduduk:

- a. Total populasi.
- b. Laju pertumbuhan penduduk.
- c. Kepadatan penduduk.

2.9.5 Realisasi Anggaran (Y)

Realisasi anggaran adalah tingkat ketercapaian pelaksanaan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Menurut Mardiasmo (2018), realisasi anggaran mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menjalankan program yang direncanakan secara efektif, efisien, dan sesuai target.

Kajian terbaru oleh Setyawan & Handayani (2022) menegaskan bahwa deviasi yang tinggi antara anggaran dan realisasi menunjukkan lemahnya akurasi perencanaan dan efektivitas implementasi kebijakan fiskal daerah. Sebaliknya, realisasi anggaran yang tinggi menandakan pemerintah mampu menyalurkan dana secara tepat waktu dan tepat sasaran.

Fungsi Realisasi Anggaran:

- a. Alat ukur kinerja keuangan daerah.
- b. Indikator efektivitas dan efisiensi perencanaan anggaran.
- c. Parameter akuntabilitas pemerintah daerah.

2.10 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian teoritik di atas, hipotesis penelitian ini adalah:

- a. H1: Pendapatan daerah berpengaruh signifikan terhadap realisasi anggaran kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

- b. H2: Belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap realisasi anggaran kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
- c. H3: Pembiayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap realisasi anggaran kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
- d. H4: Jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap realisasi anggaran kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
- e. H5: Pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, dan jumlah penduduk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap realisasi anggaran kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Berdasarkan hipotesis tersebut penelitian dapat dinyatakan secara matematis sebagai berikut:

- a. $H1: \beta_1 > 0 \rightarrow$ Pendapatan daerah berpengaruh positif terhadap realisasi anggaran.
- b. $H2: \beta_2 > 0 \rightarrow$ Belanja daerah berpengaruh positif terhadap realisasi anggaran.
- c. $H3: \beta_3 > 0 \rightarrow$ Pembiayaan daerah berpengaruh positif terhadap realisasi anggaran.
- d. $H4: \beta_4 > 0 \rightarrow$ Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap realisasi anggaran.
- e. $H5: \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4 \neq 0 \rightarrow$ Pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, dan jumlah penduduk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap realisasi anggaran.

Dengan demikian, kerangka teoritis yang telah disusun memperoleh bentuk matematis yang akan diuji pada tahap analisis empiris. Formulasi ini juga menjadi dasar bagi pengolahan data kuantitatif dalam Bab III dan Bab IV.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif eksplanatori. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengukur dan menguji hubungan antar variabel secara empiris menggunakan data numerik yang bersumber dari dokumen keuangan daerah dan data statistik resmi. Desain deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai kondisi pendapatan, belanja, pemberian, jumlah penduduk, dan realisasi APBD kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Sifat eksplanatori dipilih karena penelitian ini tidak hanya menjelaskan fenomena ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi anggaran, tetapi juga menganalisis hubungan kausal antara variabel independen, yaitu Pendapatan Daerah (X_1), Belanja Daerah (X_2), Pemberian Daerah (X_3), dan Jumlah Penduduk (X_4) terhadap variabel dependen yaitu Realisasi Anggaran (Y). Dengan desain ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan bukti empiris yang memperkuat landasan teoritis mengenai pengelolaan keuangan publik di tingkat daerah.

3.2 Populasi dan Teknik Sampling

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang berjumlah 15 daerah, terdiri atas 13 kabupaten dan 2 kota. Periode penelitian ditetapkan dari tahun 2019 hingga 2024 sehingga menghasilkan total 90 unit observasi (15×6 tahun). Populasi ini dipilih karena

mencerminkan keseluruhan dinamika fiskal daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang relevan dengan isu deviasi antara rencana dan realisasi APBD.

Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan metode **total sampling** atau sensus. Menurut Sugiyono (2017), total sampling digunakan apabila jumlah populasi relatif kecil dan peneliti ingin menjadikan semua anggota populasi sebagai sampel penelitian. Hal ini sejalan dengan Creswell (2014) yang menekankan bahwa penggunaan seluruh populasi dapat memperkuat validitas eksternal karena hasil penelitian mencerminkan kondisi empiris yang sesungguhnya tanpa reduksi data akibat pemilihan sampel.

Pertimbangan penggunaan total sampling dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Cakupan populasi terbatas. Jumlah unit analisis hanya 90, sehingga memungkinkan untuk dijadikan sampel secara keseluruhan tanpa menimbulkan kendala teknis dalam pengolahan data.
- b. Representasi menyeluruh. Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung memiliki variasi karakteristik fiskal dan demografis, sehingga penggunaan total sampling dapat menangkap keragaman tersebut secara utuh.
- c. Menghindari bias sampel. Dengan menjadikan seluruh populasi sebagai sampel, penelitian menghilangkan potensi bias yang muncul akibat keterbatasan atau kesalahan dalam teknik pemilihan sampel.
- d. Kesesuaian dengan tujuan penelitian. Fokus penelitian adalah menganalisis pengaruh variabel fiskal (pendapatan daerah, belanja daerah, pemberian daerah) dan variabel demografis (jumlah penduduk) terhadap realisasi anggaran. Oleh karena itu, melibatkan seluruh populasi memperkuat akurasi analisis dan generalisasi temuan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, teknik total sampling dipandang paling tepat untuk penelitian ini karena mendukung validitas eksternal, meminimalisasi bias, serta memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap fenomena realisasi APBD kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

3.3 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Variabel Independen (X):

X_1 = Pendapatan Daerah

X_2 = Belanja Daerah

X_3 = Pembiayaan Daerah

X_4 = Jumlah Penduduk

- b. Variabel Dependend (Y):

Y = Realisasi Anggaran

3.4 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional disusun agar setiap variabel dapat diukur secara kuantitatif dan sesuai dengan konteks penelitian:

- a. Pendapatan Daerah (X_1): seluruh penerimaan daerah yang sah, meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari pemerintah pusat, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Diukur dalam satuan rupiah berdasarkan dokumen APBD kabupaten/kota.
- b. Belanja Daerah (X_2): seluruh pengeluaran pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Diukur dalam satuan rupiah dan mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
- c. Pembiayaan Daerah (X_3): penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah yang mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), pinjaman daerah, serta pembayaran pokok utang. Variabel ini diukur dalam rupiah.
- d. Jumlah Penduduk (X_4): total penduduk yang berdomisili di kabupaten/kota sesuai laporan Badan Pusat Statistik (BPS). Diukur dalam satuan jiwa.

- e. Realisasi Anggaran (Y): tingkat ketercapaian penggunaan anggaran daerah dibandingkan rencana yang ditetapkan dalam APBD. Indikator realisasi anggaran adalah %tase serapan anggaran (total realisasi dibagi total anggaran $\times 100\%$).

3.5 Teknik Pengumpulan Sumber Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dengan memanfaatkan data sekunder. Sumber data utama meliputi:

- a. Website resmi Badan Pusat Statistik (BPS), yang menyediakan data jumlah penduduk dan indikator keuangan daerah.
- b. Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Laporan Realisasi Anggaran (LRA) kabupaten/kota di Provinsi Lampung periode 2019-2024, yang dipublikasikan melalui situs resmi pemerintah daerah maupun Kementerian Keuangan.

Data yang dikumpulkan meliputi rencana dan realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan daerah, serta data jumlah penduduk.

3.6 Uji Validitas Data

Karena penelitian ini menggunakan data sekunder dari lembaga resmi (BPS dan pemerintah daerah), maka validitas data dijamin melalui kredibilitas sumber. Untuk memastikan keandalan, dilakukan cross-check antara data APBD, Laporan Realisasi Anggaran, dan publikasi statistik BPS. Dengan demikian, data yang digunakan dapat dipastikan valid dan reliabel untuk dianalisis.

3.7 Analisis Deskriptif dan Inferensial

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan utama, yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial.

3.7.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai variabel penelitian, yaitu pendapatan daerah (X_1), belanja daerah (X_2), pembiayaan daerah (X_3), jumlah penduduk (X_4), dan realisasi anggaran (Y). Analisis ini menyajikan nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, dan minimum dari masing-masing variabel.

Tujuan analisis deskriptif adalah untuk memahami pola data, tren perkembangan dari tahun 2019-2024, serta perbandingan antar kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Hasil analisis deskriptif disajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun diagram agar mudah dipahami.

3.7.2 Analisis Inferensial

Analisis inferensial digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Metode yang digunakan adalah **regresi linier berganda**, dengan persamaan matematis sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Realisasi Anggaran

X_1 = Pendapatan Daerah

X_2 = Belanja Daerah

X_3 = Pembiayaan Daerah

X_{14} = Jumlah Penduduk

α = konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = koefisien regresi

ε = error term

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan uji hipotesis, model regresi diuji dengan asumsi klasik untuk memastikan validitas hasil estimasi, meliputi:

- a. Uji normalitas
- b. Uji multikolinearitas
- c. Uji heteroskedastisitas
- d. Uji autokorelasi

3.7.4 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan tahapan, yaitu:

- a. Uji Parsial (t-test): digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen (X_1, X_2, X_3, X_4) terhadap variabel dependen (Y). Hipotesis diterima jika nilai signifikansi (p-value) < 0,05 pada taraf kepercayaan 95%.
- b. Uji Simultan (F-test): digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis diterima apabila nilai signifikansi (p-value) < 0,05.
- c. Koefisien Determinasi (R^2): digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen.

3.8 Tingkat Signifikansi Penelitian

Tingkat signifikansi merupakan batas probabilitas kesalahan yang ditetapkan peneliti dalam menerima atau menolak hipotesis. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi (α) sebesar 5% (0,05), yang berarti terdapat kemungkinan kesalahan sebesar 5% dalam pengambilan keputusan penelitian.

Alasan pemilihan tingkat signifikansi 5% adalah karena standar ini umum digunakan dalam penelitian sosial dan administrasi publik untuk menjaga keseimbangan antara risiko kesalahan tipe I (menolak hipotesis yang benar) dan kesalahan tipe II (menerima hipotesis yang salah). Dengan demikian, keputusan statistik yang diambil memiliki tingkat keandalan sebesar 95%.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika nilai p-value (sig.) < 0,05, maka hipotesis alternatif (H_a) diterima dan hipotesis nol (H_0) ditolak. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai p-value (sig.) $\geq 0,05$, maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak. Hal ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

Tingkat signifikansi ini digunakan dalam uji parsial (t-test), uji simultan (F-test), dan perhitungan koefisien determinasi (R^2) untuk memastikan validitas hasil analisis regresi linier berganda.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Daerah (X_1), Belanja Daerah (X_2), Pembiayaan Daerah (X_3), dan Jumlah Penduduk (X_4) terhadap Realisasi Anggaran (Y) pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung periode 2019-2024. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, uji asumsi klasik, pemilihan model regresi panel, dan pengujian hipotesis, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Pendapatan daerah berpengaruh signifikan terhadap realisasi anggaran. Temuan tersebut menegaskan bahwa kapasitas fiskal daerah menjadi penentu utama kemampuan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Daerah dengan PAD dan dana transfer yang lebih besar menunjukkan tingkat realisasi anggaran yang lebih stabil dan terukur.
2. Belanja daerah terbukti berpengaruh signifikan terhadap realisasi anggaran. Variabel ini merupakan indikator komitmen kebijakan pemerintah daerah. Tingkat realisasi belanja yang tinggi menunjukkan efektivitas pelaksanaan program kerja serta kualitas perencanaan anggaran. Sebaliknya, rendahnya realisasi belanja menjadi indikasi lemahnya manajemen pelaksanaan anggaran, koordinasi OPD, atau keterlambatan proses pengadaan.
3. Pembiayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap realisasi anggaran. Temuan ini menunjukkan bahwa instrumen pembiayaan, baik melalui pemanfaatan SILPA maupun pinjaman daerah, memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas APBD. Kabupaten/kota yang mampu

- mengelola pemberian secara tepat dan sesuai kebutuhan cenderung memiliki deviasi yang lebih kecil antara rencana dan realisasi anggaran.
4. Jumlah penduduk sebagai variabel demografis turut memberikan pengaruh signifikan terhadap realisasi anggaran. Daerah dengan populasi besar menghadapi tuntutan belanja publik yang lebih tinggi pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tekanan kebutuhan ini memengaruhi kapasitas pemerintah daerah dalam menyerap anggaran, sehingga jumlah penduduk menjadi faktor determinan yang tidak dapat diabaikan.
 5. Analisis simultan menunjukkan bahwa keempat variabel-pendapatan daerah, belanja daerah, pemberian daerah, dan jumlah penduduk berpengaruh secara bersama-sama terhadap realisasi anggaran. Model yang dihasilkan memiliki daya jelaskan yang baik (R^2), sehingga mampu menggambarkan keterkaitan antara faktor fiskal dan demografi terhadap pencapaian realisasi anggaran kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Hasil ini sejalan dengan teori Keuangan Publik Musgrave yang menegaskan peran fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam kinerja fiskal pemerintah.

Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dengan mengintegrasikan variabel fiskal dan demografis dalam satu model, sekaligus memperkaya literatur mengenai realisasi APBD pada konteks daerah Lampung yang sebelumnya belum banyak diteliti.

5.2 Saran

Selain untuk pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan APBD, yaitu

1. Efisiensi realisasi belanja dapat ditingkatkan dengan mempercepat proses pengadaan barang/jasa dan mengurangi dominasi belanja pegawai agar porsi belanja modal dapat diperbesar.

2. Pemanfaatan SILPA harus dilakukan secara produktif, bukan menjadi tumpukan anggaran yang tidak terserap; pemerintah daerah perlu meningkatkan perencanaan pembiayaan yang berbasis kebutuhan pembangunan nyata.
3. Pemerintah daerah perlu menyesuaikan kebutuhan anggaran berdasarkan dinamika jumlah penduduk, terutama untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan publik dasar.
4. Penguatan akuntabilitas publik dan transparansi anggaran harus terus dilakukan melalui publikasi data fiskal secara terbuka, evaluasi berkala, dan pengawasan partisipatif masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, I., & Risnawati, W. (2024). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Realisasi Penggunaan Anggaran pada Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Jawa Barat. *Akurat: Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 15(3), 29-43.
- Bird, R., & Vaillancourt, F. (2006). Fiscal Decentralization in Developing Countries: A Review of Experience. *World Development*, 34(9), 1557-1569.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022*. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia 2022*. Jakarta: BPS RI.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Provinsi Lampung dalam Angka 2023*. Jakarta: BPS RI.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2019-2024). *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia*. Jakarta: BPS RI.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Espinoza, E. (2014). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan. *Jurnal Universitas Sumatera Utara Medan*.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2019). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2020). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hasanah, N., & Yuliani, E. (2019). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Daerah dalam Peningkatan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 10(2), 123-135.

- Hope, K. R. (2020). *Public Financial Management: Principles and Practice*. London: Routledge.
- Indarti, M. G. K., & Suwarti, T. (2011). *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Stikubank.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2020). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Pemerintahan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2021). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Martinez-Vazquez, J., & McNab, R. (2003). Fiscal Decentralization and Economic Growth. *World Development*, 31(9), 1597-1616.
- Musgrave, R. A. (1959). *The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*. New York: McGraw-Hill.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. New York: McGraw-Hill.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal Federalism*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
- Oates, W. E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120-1149.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Prasetyo, D., & Lestari, R. (2021). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Belanja Daerah, dan Transparansi terhadap Realisasi Anggaran pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 8(1), 45-61.
- Rodríguez-Pose, A., & Ezcurra, R. (2010). Does Decentralization Matter for Regional Disparities? A Cross-country Analysis. *Journal of Economic Geography*, 10(5), 619-644.
- Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. (1987). Accountability in the Public Sector: Lessons from the Challenger Tragedy. *Public Administration Review*, 47(3), 227-238.

- Santosa, R. (2020). Pengaruh Pengelolaan Pembiayaan Daerah terhadap Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 98-110.
- Sari, D., & Pratama, R. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Belanja Modal terhadap Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan Daerah*, 7(2), 55-67.
- Sari, F., & Utama, A. (2021). Pengaruh Belanja Modal terhadap Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Publik*, 5(1), 21-35.
- Setyawan, H., & Handayani, L. (2022). Analisis Deviasi Anggaran terhadap Efektivitas Pengelolaan APBD di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Administrasi Publik*, 9(2), 101-118.
- Tamesoleng, A. (2015). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, 3(1), 45-55.
- Wulandari, S., & Hidayat, A. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Realisasi Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 12(3), 77-89.